HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
26 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

LIFESTYLE

Kekayaan Sekretaris Wantimpres M Qodari Tembus Rp300,59 Miliar

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.50 WIB



Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kekayaan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari tercatat mencapai Rp300,59 miliar.

Sebagian besar harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang nilainya menembus Rp195,38 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan bersih Qodari mencapai Rp300.591.467.679 setelah dikurangi utang.

Sementara itu, total aset sebelum dikurangi utang tercatat sebesar Rp302.768.129.203.

Kekayaan tersebut berasal dari sejumlah komponen, mulai dari properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga kas dan setara kas.

- Tanah dan bangunan: Rp195.388.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp1.828.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp18.007.200.000
- Surat berharga: Rp34.516.604.697
- Kas dan setara kas: Rp52.644.124.492
- Harta lainnya: Rp384.200.014
- Utang: Rp2.176.661.524

Dari keseluruhan aset tersebut, properti menjadi penyumbang terbesar kekayaan Qodari. Nilainya mencapai sekitar 64% dari total aset yang dilaporkan.

Qodari melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan di berbagai wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangka Raya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, hingga Lampung Utara.

Salah satu aset dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Pusat seluas sekitar 780 meter persegi dengan nilai mencapai Rp56,7 miliar.

Selengkapnya di halaman 19 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kandidat Pengganti Gibran akan Diverifikasi 34 Anggota MPR



BANDA ACEH -Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membentuk tim verifikasi berisi 34 anggota untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan salah satu keputusan rapat gabungan (Ragab) MPR bersama pimpinan …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sulitnya Percaya Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan Prabowo: Faktor Kedekatan Jokowi Jadi Sorotan



BANDA ACEH - Kedekatan historis Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab utama sulitnya publik memercayai bahwa Listyo sebagai end user atau penerima hasil akhir dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 16
LIFESTYLE 19
Aneka Berita 21

ACEH

Peserta Olimpiade PAI Aceh Barat Siap Berlaga di Grand Final Nasional



MEULABOH – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Aceh Barat melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta sejumlah pejabat terkait untuk memperkuat dukungan bagi peserta yang meraih juara nasional dan lolos ke Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) …

Selengkapnya di halaman 16 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Golkar Sarankan Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra untuk Cegah Konflik Antarpartai



BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar posisi Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diisi oleh kader internal Partai Gerindra atau sosok non-partisan.

Opsi tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga stabilitas Politik dan menghindari potensi gesekan di antara partai-partai pendukung pemerintahan …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

28 BERITA

NASIONAL

Golkar Sarankan Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra untuk Cegah Konflik Antarpartai

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.42 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar posisi Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diisi oleh kader internal Partai Gerindra atau sosok non-partisan.

Opsi tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga stabilitas Politik dan menghindari potensi gesekan di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan figur pengganti. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu menjaga kekompakan koalisi agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif hingga akhir masa jabatan periode 2024-2029.

"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari non-partisan," kata Idrus kepada wartawan, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, apabila posisi tersebut diberikan kepada kader partai politik di luar Gerindra, peluang munculnya persaingan kepentingan di antara partai koalisi cukup terbuka. Sebab, masing-masing partai dinilai memiliki aspirasi dan kepentingan untuk ikut menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo.

Bahkan, lanjut Idrus, apabila kader Golkar yang dipilih menjadi wakil presiden sekalipun, hal itu belum tentu dapat diterima sepenuhnya oleh partai-partai lain. Situasi serupa juga berpotensi terjadi jika figur dari partai politik lain yang mendapatkan posisi tersebut.

"Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan," ucap Idrus.

Ia menyebut sejumlah partai politik, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB juga memiliki kepentingan dalam dinamika politik pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, memilih figur dari internal Gerindra bisa menjadi jalan untuk mengurangi potensi persaingan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.

"Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada," jelasnya.

Prabowo Diminta Akhiri Hiruk-Pikuk Politik

Idrus menegaskan, proses penentuan pengganti Gibran harus mengutamakan persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran memang memiliki aspirasi masing-masing, tetapi keputusan akhir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan.

Ia juga mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki pandangan serupa. Pergantian wakil presiden diharapkan tidak justru membuka babak baru persaingan politik di antara partai pendukung pemerintah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kandidat Pengganti Gibran akan Diverifikasi 34 Anggota MPR

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.29 WIB



BANDA ACEH -Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membentuk tim verifikasi berisi 34 anggota untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan salah satu keputusan rapat gabungan (Ragab) MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Sebagai tindak lanjut, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Presiden diberikan waktu 14 hari untuk menyampaikan kedua nama tersebut.

"Output Ragab adalah kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Habiburokhman berharap surat tersebut dapat dikirim pada hari yang sama sehingga penghitungan tenggat waktu pengajuan dua kandidat segera dimulai.

Setelah kedua nama diterima, MPR akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari 34 anggota. Tim ini bertugas memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen masing-masing calon sebelum dibawa ke rapat paripurna MPR.

"Dari dua nama itu kemudian kami akan membentuk yang namanya tim verifikasi. Tim verifikasi itu ada 34 anggota MPR yang akan memverifikasi syarat dan kelengkapan dua calon tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, rapat paripurna MPR akan memilih Wakil Presiden yang akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan seluruh fraksi menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung kondusif, tanpa kegaduhan, dan dapat diselesaikan secepat mungkin.

Menurutnya, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu berlangsung terlalu lama meskipun konstitusi memberikan batas waktu hingga 60 hari.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pelengkap. Dalam pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden memiliki pembagian tugas masing-masing.

"Jabatan Wapres kan bukan sekadar ban serep," tuturnya.

Ia mencontohkan, selama ini Gibran menjalankan sejumlah tugas pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Sementara Prabowo memiliki agenda internasional dan sejumlah agenda besar di dalam negeri.

Karena itu, menurut Habiburokhman, keberadaan Wakil Presiden diperlukan agar pembagian tugas pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

NASIONAL

Kasus LSP Buka Tabir Gelap Era Jokowi

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.15 WIB

BANDA ACEH -Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan komplotan Listyo Sigit Prabowo (LSP) mulai membuka tabir berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini ramai menjadi desas-desus di kalangan elite Politik.

Dino menyebut, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), banyak beredar cerita mengenai dugaan konspirasi, konflik kepentingan, kolusi antara petinggi dan oligarki, hingga penyalahgunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik.

Menurutnya, berbagai dugaan tersebut selama ini hanya menjadi perbincangan dan spekulasi di kalangan elite politik. Namun, tidak banyak pihak yang berani mengungkapkannya secara terbuka karena takut atau memilih mencari aman.

"Di periode ke-2 era Pemerintahan Jokowi, kita banyak mendengar desas-desus mengenai maraknya praktik konspirasi, abuse of power, konflik kepentingan, kolusi petinggi dengan oligarki atau mafia tertentu, blackmail sebagai modus operandi politik, pelanggaran hukum, weaponization hukum," kata Dino lewat akun X miliknya, Kamis, 12 November 2026.

Ia juga menyinggung dugaan penggalangan dana secara masif dengan cara tidak wajar bahkan ilegal, kriminalisasi lawan politik, mobilisasi buzzer dalam skala besar, serta manipulasi institusi Polri.

Selain itu, Dino menyoroti dugaan penyalahgunaan KPK, kejaksaan, dan institusi pajak sebagai instrumen untuk menekan lawan politik.

"Elite politik tidak pernah habis cerita, gosip dan spekulasi mengenai hal-hal ini, namun semuanya tiarap karena takut atau mau cari aman," ujarnya.

Dino menilai kasus penyadapan yang menyeret komplotan LSP kini mulai membuka berbagai dugaan tersebut ke ruang publik.

"Kasus penyadapan komplotan LSP mulai membuka tabir yang sebelumnya tertutup rapih bahwa sebagian (besar) dari desas-desus ternyata benar adanya, dan bahkan lebih parah dari yang diperkirakan," tegasnya.

Lebih jauh, ia berharap terungkapnya kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pemerintahan yang dinilainya telah banyak mengalami kerusakan.

Dino juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, langkah Kapolri menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Mudah-mudahan tragedi ini bisa menjadi awal yang baik bagi Presiden Prabowo untuk memulai berbagai upaya korektif terhadap sistem yang sudah banyak dirusak. Salut terhadap Kapolri Suyudi yang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Polri. Semoga bersih-bersih ini bisa diikuti yang lain," pungkasnya.

NASIONAL

Aliansi Masyarakat Sipil Turunkan Foto Wapres Gibran di Gedung DPRD Jabar

Oleh Redaksi · 12 Nov, 21.09 WIB

BANDA ACEH – Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di Gedung DPRD, Kamis (12/11/2026).

Aksi pencopotan foto wapres itu terjadi saat mereka menyampaikan aspirasi Politik terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

Usai mencopot foto wapres, massa membalikkan posisi bingkai foto tersebut karena menilai yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai wapres.

Menanggapi aksi pencopotan foto Wakil Presiden tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa menegaskan, tindakan menurunkan foto Gibran bukanlah langkah lembaga legislatif daerah.

Menurut Buky Wibawa, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat tetap berpegang pada prosedur ketatanegaraan dan akan menunggu keputusan resmi negara terkait status pengunduran diri wakil presiden.

Dia menegaskan, jika ada pihak yang menurunkan foto Wakil Presiden di lingkungan gedung Dewan, hal tersebut murni merupakan tindakan pribadi dari peserta aksi dan bukan sikap institusi DPRD Jawa Barat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sulitnya Percaya Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan Prabowo: Faktor Kedekatan Jokowi Jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.14 WIB



BANDA ACEH - Kedekatan historis Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab utama sulitnya publik memercayai bahwa Listyo sebagai end user atau penerima hasil akhir dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro menanggapi keraguan masyarakat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran para tersangka kasus akses ilegal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11).

Agung menilai bahwa situasi ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja opini publik yang terbangun dari rekam jejak hubungan personal masa lalu.

Mengingat Listyo Sigit merupakan figur yang memegang masa jabatan terlama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai saat ini.

"Top of mind mereka itu kan Pak Listyo ini paling lama menjabat di masa Pak Jokowi ya. Nah, sisanya di masa Pak Prabowo, seperti itu. Jadi wajar kalau persepsi mereka mengatakan sebaliknya," ujarnya, Jumat (13/11).

Kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi sudah terbangun sejak 2011. Semasa Listyo masih menjabat sebagai Kapolresta Surakarta, sementara Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan historis inilah yang membuat publik sulit melepaskan asumsi tersebut dari pusaran kasus dugaan penyadapan yang tengah diusut.

"Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat," terangnya.

Agung menegaskan, opini masyarakat tidak bisa dipaksa untuk langsung berubah dalam waktu singkat.

Satu-satunya cara paling efektif bagi institusi Polri adalah membuktikan profesionalitas melalui kerja nyata yang transparan.

"Polri profesional saja. Cara mengubah persepsi itu apa? Ya kinerja yang oke, pembuktian yang transparan, penyidikan yang akuntabel, ya. Sehingga apa? Persepsi itu bisa terbit perlahan. Karena kan persepsi itu nggak bisa dipaksa," tegasnya.

Duduk Perkara Kasus Penyadapan Prabowo

Sebelumnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran dari empat orang tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit berperan sebagai pihak yang memberikan perintah, menentukan target, hingga menjadi end user penerima laporan hasil penyadapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa TK? Sosok Misterius yang Disebut Kapolri Terlibat Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.25 WIB

BANDA ACEH - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok baru berinisial TK.Namanya mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam memerintahkan kegiatan pengawasan atau surveillance.

Sosok TK disebut dalam pemaparan Suyudi saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis, (12/11/26). Namun, Kapolri belum mengungkap identitas TK maupun siapa pihak yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.

Dalam perkara ini, Ahrie diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga melaporkan hasilnya kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada (7/10/25) hingga (1/10/ 26).

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada (7/10/25) sampai dengan (1/10/26) diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.

Dalam pengungkapan di hadapan anggota DPR, Suyudi juga membeberkan dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.

Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," katanya.

Tak hanya itu, Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," ujarnya.

Dugaan aktivitas tersebut kemudian memunculkan kecurigaan pelapor hingga perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada (30/10/26). Identitas pelapor dirahasiakan dan laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada (1/11/26) dan ditahan sehari kemudian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PKB Bantah Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.37 WIB



BANDA ACEH - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II Muhammad Khozin mengklarifikasi informasi yang beredar tentang usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan sesuai ketentuan undang-undang dasar 1945 dan UU MD3, pengusulan calon wapres adalah hak mutlak presiden.

“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal Hak Angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” bantah Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini, sejak awal PKB menempatkan Putusan MK dan Putusan MA sebagai dasar langkah Politik di Parlemen, sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah sesegera mungkin.

“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tegas Khozin.

Ia berharap lembaga terkait seperti Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan merujuk UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPD.

“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” harap Khozin.

Khozin kembali menegaskan dalam diskusi dan komunikasi di internal partai sama sekali tidak ada pembahasan mengenai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mengisi jabatan Wapres.

“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” tandas Khozin

NASIONAL

Pesan Terakhir Gibran usai Mundur: Mohon Maaf untuk Setiap Hati yang Terluka

Oleh Redaksi · 12 Nov, 21.04 WIB



Momen permohonan maaf yang tulus disampaikan dengan penuh kerendahan hati oleh Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Gestur tangan yang terkatup

BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Gibran Rakabuming Raka mengakui masih ada harapan rakyat yang belum terwujud hingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan selama dirinya mengemban amanah tersebut.

Ungkapan ini disampaikan Gibran Rakabuming Raka melalui pernyataan yang diunggah di media sosial.

Dalam pesan perpisahannya, Gibran secara khusus meminta maaf atas segala keterbatasan selama menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf," kata Gibran.

Dia melanjutkan, "Untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf."

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Lengsernya Gibran Buktikan Jokowi Effect Sudah Tidak Powerfull Lagi

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.11 WIB



BANDA ACEH - Kursi Wakil Presiden RI resmi lowong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) pukul 11.17 WIB.

Peristiwa Politik luar biasa ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa pengaruh politik Joko Widodo atau Jokowi effect saat ini sudah tidak powerful lagi di panggung nasional.

Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro menilai, figur Jokowi masih besar, namun tidak lagi sebesar ketika ia masih menjabat sebagai kepala negara. Apalagi, berbagai isu negatif terus menerpanya.

"Pak Jokowi masih besar, tapi tidak sebesar ketika ia menjabat sebagai presiden. Karena kita tahu pengaruh ini pudar karena diuji dengan masalah demi masalah yang tak kunjung selesai ya," ujar Agung Baskoro kepada JawaPos.com, Jumat (13/11).

Deretan isu tersebut mencakup polemik ijazah S1 Jokowi, ijazah SMA Gibran, hingga wacana pemakzulan yang lebih awal didorong oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Belum lagi, dinamika politik ini turut diperparah oleh residu dari kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, historis kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi membuat publik sulit melepaskan asumsi keterkaitan Jokowi dari pusaran kasus ini.

"Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat," terangnya.

Peristiwa ini sekaligus menorehkan sejarah baru di Indonesia pasca reformasi. Untuk pertama kalinya, seorang wakil presiden harus turun di tengah jalan karena gagal mengonsolidasikan elite politik di negeri ini.

"Pertama kalinya pasca reformasi ada wapres yang turun di tengah jalan, ia gagal mengkonsolidasikan elit politik di negeri ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, pengunduran diri Gibran ini merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya, Rabu (11/11) pagi, ia lebih dulu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penyerahan dokumen tersebut dan memastikan lembaganya akan segera memproses dokumen itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani, Kamis (12/11)

NASIONAL

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.04 WIB



BANDA ACEH -Puluhan kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.

Kedatangan para kader ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi internal partai sekaligus aksi simbolik dengan cara menyegel kantor partai.

Koordinator Kader Penyelamat Ka'bah (KPK), Ahmad Yani mengatakan kedatangan dirinya bersama puluhan Pengurus Nasional F-PPP untuk menuntut keadilan terhadap sejumlah pengurus partai yang diberhentikan sepihak oleh pengurus DPP.

Termasuk pemberhentian sepihak Ketua Umum Mardiono terhadap Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) selaku Sekjen Partai dan Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum Partai.

"Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai partai. Kemudian abang kita, bang Sandiaga uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART," tegas Ahmad Yani dalam keterangannya, dikutip Jumat, 13 November 2026.

Ahmad Yani menilai, seharusnya orang-orang yang telah memberikan kontribusi dan energinya terhadap perjuangan partai tidak dibuang begitu saja. Terlebih, pasca Muktamar Partai, ia menganggap dinamika internal mengharuskan adanya rekonsiliasi partai.

Menurutnya, langkah Mardiono Dkk dinilai telah menciderai semangat rekonsiliasi partai dan cenderung menambah gaduh dengan cara melakukan pemecatan sejumlah pengurus dan anggota DPRD di daerah.

"Kemudian keputusan mahkamah partai Politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak maruwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, kepulauan riau, termasuk di prabumulih, belum lagi yang lain," ungkapnya.

Ahmad Yani menambahkan, aksi segel kantor DPP dilakukan setelah dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) secara during yang diikuti oleh 200 fungsionaris PPP dari 38 Provinsi dan didukung petisi 500 Kader ditingkat Kabupaten/Kota dari Aceh hingga Papua. Dalam Mubes tersebut, salah satunya mendesak Menteri Hukum untuk mencabut SK Mardiono.

"Mendesak Presiden copot Mardiono dari jabatab UKP (Utusan Khusus Presiden). Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," pungkasnya.

NASIONAL

Kata-kata Gibran Saat Peluk Prabowo: Saya Minta Maaf Ya Pak

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.29 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka setelah menyatakan menerima pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden. Gibran menyampaikan permintaan maaf ke Prabowo.Momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Prabowo dan Gibran awalnya bersalaman.

Gibran tampak mencium tangan Prabowo. Prabowo kemudian memeluk Gibran.

"Saya minta maaf, ya, Pak," ujar Gibran.

Prabowo kemudian menepuk-nepuk pundak Gibran. Setelah itu, Gibran tampak bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Gibran juga berpelukan dengan Dasco.

Sebelumnya, Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatan wapres. Gibran menyerahkan surat ke Prabowo dan MPR.

MPR kemudian menindaklanjuti surat itu. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan jabatan wapres kosong mulai hari ini.

Dia mengatakan MPR akan meminta Prabowo mengirimkan dua nama calon wakil presiden. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mengisi jabatan wapres.

NASIONAL

Dapur SPPG Umbulharjo Ditemukan Lalat dan Indikasi Tikus, 162 Orang Diduga Keracunan

Oleh Van · 12 Nov, 17.04 WIB

SLEMAN — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cangkringan, Sleman, mengungkap persoalan sanitasi di dapur SPPG Umbulharjo.

Dinas Kesehatan menemukan lalat, serangga, hingga indikasi keberadaan tikus saat memeriksa fasilitas pengolahan makanan tersebut.

Kepala Bidang P2PL Dinkes Sleman Khamidah Yuliati mengungkapkan temuan itu setelah tim melakukan pemeriksaan lingkungan dan menelusuri proses pengolahan makanan.

“Ada juga indikasi keberadaan tikus di gudang basah,” kata Khamidah, Rabu, 11 November 2026.

Lalat hingga Indikasi Tikus di Dapur

Lalat dan serangga ditemukan di sejumlah area, mulai gudang buah dan sayur, ruang persiapan, ruang pengolahan, hingga tempat pencucian peralatan masak.

Tim juga mencatat belum adanya pemantauan suhu penyimpanan bahan makanan secara rutin. Temuan tersebut menjadi catatan serius terkait penerapan higiene dan sanitasi dapur.

Dinkes mengingatkan pengelola agar menjalankan seluruh prosedur keamanan pangan secara ketat. “SOP harus dijalankan secara ketat,” tegas Khamidah.

162 Orang Mengalami Gejala

Dinkes mencatat 162 orang mengalami gangguan pencernaan setelah diduga mengonsumsi menu MBG dari SPPG Umbulharjo.

Rinciannya, 137 orang berasal dari SMP Negeri 2 Cangkringan dan 25 orang dari SMP Negeri 1 Cangkringan. Keluhan meliputi sakit perut, diare, pusing, mual, hingga muntah.

Analisis epidemiologi sementara menunjukkan semur ayam memiliki asosiasi statistik paling kuat dengan kejadian tersebut.

Namun, Dinkes menegaskan temuan itu belum membuktikan makanan tersebut sebagai penyebab keracunan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Gibran untuk MPR

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.12 WIB

BANDA ACEH -Wakil Presiden RI ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya atas permintaan sendiri dengan alasan demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam surat pengunduran diri yang diserahkan kepada pimpinan MPR, Gibran menegaskan kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat tersebut setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya pada pukul 11.26 WIB.

“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian isi surat yang dibacakan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 12 November 2026.

Dalam surat tersebut, Gibran juga menyampaikan alasan umum di balik keputusannya. Namun, tidak ada penjelasan spesifik mengenai alasan pengunduran diri yang dicantumkan dalam surat itu.

“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” lanjut isi surat tersebut.

Muzani menegaskan, surat yang diserahkan Gibran tidak menyebutkan alasan lebih lanjut mengenai keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Sebelum meninggalkan Kompleks Parlemen, Gibran terlihat menunjukkan ekspresi sedih saat berpamitan dengan pimpinan dan anggota MPR.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tak Lagi Jabat Wapres, KPK Didesak Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Oleh Redaksi · 13 Nov, 14.03 WIB



BANDA ACEH - Berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan Politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya berani bertindak terhadap masyarakat biasa, tetapi ragu ketika berhadapan dengan keluarga mantan presiden,” ujarnya.

Soroti Laporan Ubedilah Badrun

Sebagaimana diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022 mendatangi KPK untuk melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan relasi bisnis.

Dalam laporan tersebut, Ubedilah mempersoalkan dugaan aliran dana penyertaan modal sekitar Rp99,3 miliar dari perusahaan modal ventura kepada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Resmi Surati Prabowo, Dua Nama Pengganti Gibran Diminta Segera Disetor

Oleh Van · 13 Nov, 19.46 WIB



JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam keterangan resminya Jumat, (13/11/2026) mengatakan, surat tersebut akan dikirim pada hari yang sama. Dua nama yang diajukan Prabowo nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum memasuki tahapan pemilihan.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segara menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," kata Muzani.

Selain meminta dua nama kandidat, rapat gabungan tersebut juga menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan wakil presiden baru.

Muzani menyampaikan seluruh rangkaian proses tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini," imbuh Muzani.

Dengan keputusan tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan di MPR. Setelah menerima dua nama dari Presiden, tim verifikasi akan memeriksa persyaratan masing-masing kandidat sebelum pemilihan dilaksanakan.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).

Presiden Prabowo Subianto juga telah resmi menerima pengunduran diri tersebut. Kondisi ini membuat proses penentuan pengganti Gibran menjadi agenda yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.(*)

NASIONAL

Muzakir Manaf Mantan Panglima GAM Calon Pengganti Gibran?

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.41 WIB

BANDA ACEH – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026) memicu spekulasi luas soal figur pengganti. Salah satu nama yang belakangan dibicarakan sebagian pihak sebagai opsi potensial adalah Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal sebagai Mualem, Gubernur Aceh yang menjabat sejak 12 Februari 2025.Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, jabatan Wapres kosong sejak hari itu, dan MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden diberi waktu hingga 14 hari untuk mengajukan dua nama beserta kelengkapan persyaratan.

Hingga saat ini, nama-nama yang paling sering muncul dalam analisis Politik dan pemberitaan meliputi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Anies Baswedan, serta sejumlah kader Gerindra. Muzakir Manaf belum menjadi nama utama dalam daftar tersebut, namun latar belakang dan kedekatannya dengan Prabowo membuat sebagian pengamat menilai ia layak diperhitungkan sebagai opsi pendukung atau penyeimbang.

Muzakir Manaf lahir 3 April 1964 di Seunuddon, Aceh Utara. Ia adalah mantan Panglima tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Abdullah Syafi’i, Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007, dan pernah menjabat Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017. Pada Pilpres 2024, ia ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Gibran di Aceh dan sebelumnya juga memimpin pemenangan Prabowo-Sandi pada 2019 yang meraih suara dominan di Aceh.

Pada Pilkada Aceh 2024, Muzakir berpasangan dengan Fadhlullah (kader Gerindra) dan memenangkan pemilihan dengan sekitar 53 persen suara, lalu dilantik sebagai Gubernur Aceh. Ia juga menjabat Waliyul ‘Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Baru-baru ini, pada 4 November 2026, Muzakir bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara untuk membahas isu strategis Aceh, termasuk keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian hukum Bendera Aceh, status tanah wakaf Blang Padang, serta usulan dana abadi bagi mantan kombatan GAM. Pertemuan itu mendapat respons positif dari Prabowo.

Para pendukung potensial menilai pengalaman Muzakir dalam mengelola daerah pascakonflik, basis dukungan kuat di Aceh, serta loyalitas politik terhadap Prabowo menjadi keunggulan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

LPI Sebut Dasco Sosok Tepat Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.48 WIB

BANDA ACEH - Wacana mengenai sosok yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian di tengah perkembangan Politik nasional.Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menyampaikan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi figur yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam wacana tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional (DEN) LPI, Akhrom Saleh menilai, Sufmi Dasco memiliki kapasitas politik dan karakter kenegarawanan yang dibutuhkan untuk membantu Presiden Prabowo menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.

"Pengalaman serta kemampuan komunikasi politik Dasco diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus menjaga situasi politik nasional tetap kondusif," kata Akhrom dalam Konferensi pers di Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menilai stabilitas politik mempunyai hubungan erat dengan kondisi perekonomian. Situasi politik yang kondusif dinilai dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Tentunya kalau stabilitas politik kita tenang, ekonomi juga berjalan baik, investor juga bisa tenang," tandasnya.

Dia menekankan, Dasco merupakan sosok yang pas untuk mendampingin Prabowo dalam memimpin pemerintahan ini.

"Intinya kami sampai saat ini hanya beliau (Dasco), untuk yang lain kami belum melihat," tandasnya.

Dia menyebutkan, saat ini stabilitas politik Indonesia tidak baik. Alhasil, sambungnya, hal tersebut juga berdampak pada perekonomian bangsa.

"Stabilitas politik kita dalam dua tahun ini gonjang ganjing, kita tau sama-sama seperti apa jadinya, ekonomi juga jadi berpengaruh, kita harapkan dengan stabilitas …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pasukan Gibran Indonesia Serukan Lawan Prabowo

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.53 WIB



BANDA ACEH - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menyisakan ketegangan Politik. Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan melontarkan seruan perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Seruan tersebut disampaikan Fritz di kantor Wakil Presiden, Jakarta, saat melepas Gibran setelah menyatakan mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Fritz mengaku kecewa terhadap sikap Prabowo yang dinilainya membiarkan Gibran terus menjadi sasaran serangan sejumlah anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Saya sesalkan Prabowo diam saja. Kita lawan Prabowo,” ungkap Fritz, Kalis (12/11/2026).

Menurut Fritz, perlakuan terhadap Gibran mencerminkan ketidakadilan politik. Ia menilai Presiden seharusnya memberikan perlindungan politik kepada wakilnya, bukan membiarkan berbagai serangan terhadap Gibran berkembang tanpa pembelaan yang memadai.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri persoalan politik di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Sebagaimana diketahui, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri.

“Saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian isi surat yang dibacakan Ahmad Muzani.

Pengunduran diri itu berlangsung setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menguat menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

CNN Indonesia (12/11/2026) melaporkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang menyangkut kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut dibatalkan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Dalam pernyataan di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran.

Prabowo bahkan menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.

Presiden juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan.

Menurut Prabowo, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan terhadap 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun terakhir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Said Abdullah: Wapres Ideal Prabowo Harus Kuat di Parlemen dan Tak Jadi Matahari Kembar

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.41 WIB



BANDA ACEH -Wakil presiden ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto harus berasal dari kekuatan Politik besar di parlemen, memiliki pengalaman di pemerintahan, serta mampu melengkapi kepemimpinan nasional tanpa menjadi pesaing presiden.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai, sosok tersebut juga harus memiliki ikatan kuat dengan presiden, memahami karakter kepemimpinannya, dan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Menurut Said, calon wakil presiden sebaiknya berasal dari kekuatan politik yang memiliki posisi besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan menjadi yang terbesar. Namun, kekuatan politik tersebut harus diimbangi dengan kecakapan dan rekam jejak dalam pemerintahan.

Dengan bekal tersebut, wakil presiden diharapkan mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan dan mencari solusi atas berbagai persoalan strategis.

“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” tegasnya.

Said juga berpandangan, pasangan presiden dan wakil presiden idealnya dapat kembali berpasangan pada Pemilu 2029. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan diharapkan bisa dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Selain itu, wakil presiden perlu memiliki kemampuan memetakan persoalan strategis dan menawarkan solusi kepada presiden, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun menengah. Seluruh upaya tersebut tetap harus sejalan dengan arah politik yang ditetapkan presiden.

“Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan,” ujar Said.

Meski demikian, Said menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Sebagai presiden, Prabowo dinilai paling memahami figur yang dibutuhkan untuk mendampinginya, dengan mempertimbangkan perjalanan dua tahun pemerintahan serta berbagai tantangan yang masih harus dihadapi ke depan.

NASIONAL

Gibran Mundur dari Wapres, Ini Hak Pensiun dan Fasilitas yang Tetap Diterima

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.27 WIB

BANDA ACEH - - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Meski telah mengakhiri masa jabatannya lebih awal dari, Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.

Undang-undang tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas lain. Di antaranya biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.

Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Tak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri

NASIONAL

Wapres Gibran Akhirnya Tiba di MPR, Bawa Map Putih Tanpa Pengawalan Ketat

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.11 WIB

BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya tiba di gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang, 12 November 2026. Pantauan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Gibran tiba Lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam berdasi merah. Sementara itu, di tangan kirinya, Gibran menenteng berkas-berkas sambil berjalan menuju ruangan pimpinan DPR/MPR/DPD.

Dari arah parkiran mobil, Wapres Gibran terlihat berjalan sendiri. Hanya ada beberapa pengawal berbaju putih yang menyusul dari belakang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo dengan Berat Hati Terima Keputusan Gibran Resign

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.08 WIB

BANDA ACEH-Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima dengan berat hati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, 12 November 2026.

Gibran disebut telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri secara langsung kepadanya sebelum mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," sambungnya.

Prabowo menilai keputusan Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan. Dia mengapresiasi kontribusi Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa kampanye maupun dalam dua tahun pemerintahan.

Sejak awal menjabat, Prabowo telah memberikan tugas kepada Gibran untuk turun langsung ke daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memastikan program-program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Prabowo, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun.

"Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," tuturnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Country Editor Yahoo Bongkar Dalang Penyadapan Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.58 WIB



BANDA ACEH - Mantan Country Editor Yahoo Indonesia, Budi Putra, mengungkapkan bahwa sosok yang diduga menjadi mastermind atau otak di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah dapat diketahui melalui penelusuran teknologi informasi.Pernyataan tersebut disampaikan Budi Putra dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (13/11/2026). Ia menilai, identifikasi pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tidak membutuhkan waktu lama jika ditangani oleh tim teknologi informasi yang memiliki kemampuan memadai.

Dalam perbincangan bersama Darmawan Supriyossa, Budi juga menyoroti perkembangan Politik setelah munculnya pernyataan Kapolri mengenai penelusuran pasal-pasal terkait dugaan makar.

Darmawan awalnya mempertanyakan apakah dinamika politik yang melibatkan Gibran dalam kurun waktu dua setengah jam dapat menggoyang posisi Presiden Prabowo.

Budi menjelaskan, sebelum perkembangan terbaru, wacana yang berkembang sudah mengarah pada dugaan bahwa pengguna atau pihak yang memanfaatkan jaringan tersebut berasal dari satu kelompok atau geng yang sama.

“Hari ini ada pernyataan Kapolri yang menyatakan masih menelusuri pasal-pasal makar. Itu berarti cukup berdampak,” kata Budi.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut aparat kepolisian, tetapi juga berkaitan dengan pertarungan kepentingan politik. Ia mengingatkan, jika proses penanganannya tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, dampaknya justru dapat merugikan Presiden Prabowo.

“Awalnya sudah bagus. Apakah happy ending atau sad ending. Kalau hasilnya tidak memuaskan, menurut saya akan merugikan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Dalam podcast tersebut, Darmawan juga mempertanyakan kemungkinan adanya kesepakatan politik yang mempertukarkan kursi wakil presiden dengan penanganan kasus dugaan penyadapan.

Menanggapi pertanyaan itu, Budi menyebut perkembangan yang terjadi menunjukkan perubahan cukup signifikan. Namun, ia meminta agar perkembangan tersebut terus dicermati.

“Perkembangannya sangat menarik. Ada perubahan yang cukup signifikan. Tentu harus kita cermati terus,” ungkapnya.

Pembahasan kemudian mengarah pada kemampuan tim teknologi informasi untuk mengungkap pihak yang berada di ujung rantai dugaan penyadapan, termasuk penerima manfaat dan pengguna jaringan.

Darmawan mempertanyakan apakah waktu delapan hari untuk mengetahui siapa penerima manfaat dan pengguna jaringan merupakan waktu yang terlalu lama bagi tim IT.

Budi menilai, dari penelusuran awal saja, sebenarnya sudah ada petunjuk untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

“Secara random sekilas sudah ketahuan kok sebenarnya. Kalau urusan teknologi mah sehari dua hari selesai,” tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Tetapkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru pada 2 Desember 2026

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.18 WIB



BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, sidang paripurna akan digelar di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, MPR akan melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari pemilihan hingga pelantikan dan pengesahan calon wakil presiden yang terpilih.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks

Penetapan tanggal tersebut merupakan salah satu keputusan dalam rapat gabungan MPR yang digelar bersama seluruh alat kelengkapan dewan. Selain membahas jadwal sidang paripurna, rapat juga menyepakati langkah administratif untuk memulai proses pengisian jabatan wakil presiden.

Salah satu keputusan rapat gabungan itu adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut dijadwalkan disampaikan pada Jumat (13/11), dengan tujuan meminta kepala negara segera mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk diproses lebih lanjut oleh MPR.

Muzani menyampaikan, kedua nama yang diajukan Presiden nantinya akan melalui pemeriksaan oleh tim verifikasi MPR sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan.

Proses tersebut menjadi bagian dari persiapan lembaga legislatif dalam mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," pungkas Muzani

NASIONAL

Yusril: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut, Tak Lagi Punya Kekuatan Hukum

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.37 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal.

Yusril menyebut, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak ada lagi landasan hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Dia menjelaskan, pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menekankan, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keputusan administratif. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Kewajiban tersebut, lanjut dia, juga memiliki landasan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Aturan itu mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan putusan pengadilan sesuai amar yang telah ditetapkan.

Yusril berpandangan, pencabutan surat keterangan tersebut membuat tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang telah diputus pengadilan.

Dia juga menjelaskan, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang bertindak sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.

Yusril menilai putusan kasasi MA tersebut mengubah kedudukan hukum persoalan penyetaraan pendidikan Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Resign dari Wapres, Rapat Paripurna DPR Batal!

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.19 WIB



BANDA ACEH -Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari ini, Kamis, 12 November 2026.

Berkenaan dengan itu, Rapat Paripurna DPR RI yang telah dijadwalkan pukul 14.00 WIB siang ini dengan agenda tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran dibatalkan.

“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” demikian keterangan rezeki Kesekjenan DPR RI.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Hari ini, Muzani bersama para pimpinan MPR dan kelompok DPD akan menggelar rapat pimpinan (Rapim).

“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani

NASIONAL

PKB Berharap Cak Imin Dipinang Prabowo jadi Cawapres Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.54 WIB



BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipinang Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, menyikapi dinamika Politik terkait kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.

Lalu mengatakan, partainya memiliki harapan agar Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?" kata Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa proses penentuan pengganti wakil presiden masih berjalan. Karena itu, PKB memilih menunggu perkembangan dan menghormati mekanisme yang berlaku, termasuk kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan nama calon pengganti.

"Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian apa namanya, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja, ya," ujarnya.

Dia juga memastikan, seluruh kader PKB akan mengikuti keputusan yang diambil Ketua Umum. Menurutnya, sikap partai tetap solid dan tidak akan mendahului keputusan pimpinan dalam menentukan langkah politik selanjutnya.

"PKB prinsipnya sami'na wa thana terhadap Ketua Umum. Jadi Ketua Umum memutuskan apa, Ketua Umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan," tegasnya.

Lalu menilai, hal yang harus menjadi perhatian bersama saat ini adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas nasional. Dia berharap dinamika politik yang berkembang tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama DPR RI.

Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memperkeruh situasi dengan spekulasi politik. Lalu meminta semua pihak memberikan ruang politik agar proses penentuan wakil presiden berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi apa pun kondisi politik hari ini, saya mengimbau kepada kita semua, seluruh anak bangsa, mari kita sama-sama jaga kondusivitas, sama-sama jaga keamanan, serahkan sepenuhnya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan regulasi dan undang-undang," pungkasnya

NASIONAL

Cak Imin Lega Foto Gibran Dicopot dari Markas PKB

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.25 WIB



BANDA ACEH -Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akhirnya bisa bernapas lega setelah foto Wakil Presiden ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kantor DPP PKB.

Cerita itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam Dialog Publik PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Mulanya, Cak Imin berbicara mengenai pengalamannya mendukung pendirian Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku terkadang kecewa terhadap putusan lembaga tersebut, tetapi pada kesempatan lain juga merasa puas.

"Jadi, kalau ada kecewa ada puas berarti benar, MK organisasi yang benar gitu. Tapi kalau puas terus atau kecewa terus, berarti ya tidak benar. Jadi kadang kecewa, kadang senang," kata Cak Imin.

Namun, suasana kemudian mencair ketika Cak Imin menyinggung foto Gibran yang sebelumnya masih terpajang di kantor DPP PKB.

"Dulu waktu kalah pilpres, saya kaget kok masih ada foto di situ. Ternyata hari ini tercapai juga itu," kelakar Cak Imin yang langsung disambut tawa hadirin.

Foto Gibran dicopot dari markas PKB yang berada di Jalan Raden Salen, Jakarta Pusat, setelah Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis kemarin, 12 November 2026.

Cak Imin bahkan sempat melontarkan candaan kepada seseorang yang berada di lokasi.

"Gara-gara kamu ini, gara-gara kamu," seloroh Cak Imin yang juga jabat Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

NASIONAL

Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.32 WIB



BANDA ACEH - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Rizal Fadillah meninggal dunia, Jumat (13/11/2026). Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tersebut mengembuskan napas terakhir pukul 17.15 WIB.

Kabar duka tersebut diterima dari mantan Kapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Rizal meninggal di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung.

"Turut berduka cita atas meninggalnya M Rizal Fadillah. Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT," tulis Oegroseno.

Adapun, Rizal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah (Pasal 310 dan 311 KUHP) atas tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kasus tersebut terus berlanjut ke proses hukum dan persidangan yang melibatkan sejumlah tersangka lain dalam klaster terkait, sementara pihak Rizal Fadillah sempat mengajukan berbagai langkah hukum seperti gelar perkara khusus dan rencana praperadilan

NASIONAL

Bareskrim Kantongi Bukti Awal Dugaan Makar Listyo Sigit Dkk

Oleh Redaksi · 12 Nov, 12.31 WIB

BANDA ACEH - Tim khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi polisi lainnya. Temuan ini menjadi tindak pidana baru di luar kasus akses ilegal (illegal access) yang menjerat mereka sebelumnya sebagai tersangka penyadapan.Kendati demikian, kepolisian belum menetapkan status tersangka dalam perkara makar ini.

"Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," ungkap Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Asep menerangkan, para terduga pelaku tindak pidana makar tersebut meliputi Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Ia memastikan penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah pihak yang dibidik seiring berjalannya pendalaman kasus.

Pengusutan dugaan makar ini didasarkan pada Laporan Polisi (LP) yang berbeda dari kasus akses ilegal di mana keempat perwira tinggi tersebut telah berstatus tersangka.

Asep menegaskan bahwa penanganan dugaan makar saat ini masih berada dalam tahapan penyelidikan.

"Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya," kata Asep.

Selama proses bergulir, penyidik berkomitmen menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memedomani hak asasi manusia (HAM).

Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung terkait proses penanganan berkas perkaranya kelak. Asep turut mengimbau publik agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar liar di media sosial mengenai kasus ini.

Di sisi lain, masyarakat dipersilakan melapor ke Polri apabila memiliki informasi valid yang dapat membantu kelancaran pengungkapan perkara.

"Media dan masyarakat untuk tidak membentuk opini atau berita-berita yang hoaks, semua satu sumber, yaitu kami yang sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana makar tersebut," ucap Asep.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa bukti permulaan makar tersebut didapat setelah penyidik memeriksa sejumlah …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pesan Menyentuh Jokowi usai Gibran Mundur dari Kursi Wapres

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.32 WIB

BANDA ACEH – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan menyentuh usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden (wapres).

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Surat itu diserahkan saat Gibran bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR lainnya.

Jokowi mengaku sudah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan hanya sementara. "Dalam jabatan Politik pasti ada dinamika politik, itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi di Solo. Kamis (12/11/2026).

Jokowi mengungkapkan, Gibran sudah berkomunikasi dengan dirinya sebelum memutuskan mundur. Jokowi mengaku belum mengetahui langkah Gibran selanjutnya setelah mengundurkan diri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Tak Sampaikan Alasan Pengunduran Diri ke MPR

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.13 WIB

BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya saat menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Raja Jawa Mencuat sebagai Cawapres Dampingi Prabowo

Oleh Redaksi · 13 Nov, 10.38 WIB



Mantan Presiden Joko Widodo dan Sri Sultan Hamengkubuwono X tampak saling memberi salam dengan menangkupkan kedua tangan. Keduanya mengenakan kemeja batik bermotif saat bertemu di sebuah teras bangunan tradisional dengan pintu kayu besar. Di antara mereka terdapat pagar besi dekoratif berwarna hijau dengan hiasan berwarna emas. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bakal menggelar sidang untuk mengisi kekosongan jabatan dalam koridor konstitusional 60 hari, pada hari ini, Jumat (13/12/2026).

Bursa calon wakil presiden (cawapres) pun mendadak diramaikan oleh kemunculan berbagai figur yang dinilai layak menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah kalkulasi Politik para elite koalisi, nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta mendadak muncul ke permukaan.

HB X dinilai sebagai figur ideal yang dapat meredam ketegangan nasional sekaligus membuat Presiden Prabowo Subianto merasa nyaman.

Kemunculan nama Sri Sultan Hamengkubuwono X bermula dari rekomendasi para pengamat dan aktivis pemilu yang menyoroti arah konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo.

Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia, Jeirry Sumampow, secara terbuka mengingatkan agar Presiden Prabowo cermat memilih figur yang tidak memiliki ambisi pribadi untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Jeirry, kehadiran wakil presiden yang bernafsu politik tinggi sering kali memicu matahari kembar dan mengganggu stabilitas pemerintahan, terutama ketika memasuki paruh kedua masa jabatan.

"Memang perlu dicari figur yang tidak akan berpotensi untuk menjadi rival dari Prabowo di Pemilu berikutnya... Apalagi kalau Prabowo sudah mendeklarasikan diri sebagai orang yang akan mencalonkan diri lagi di 2029, ya penting juga untuk mencari figur yang tidak akan, katakanlah 'mengganggu'," ujar Jeirry.

Dari kacamata kalkulasi tersebut, Sri Sultan HB X dipandang memenuhi seluruh kriteria ideal "Zero Ambisi 2029".

Sebagai negarawan sepuh yang berakar kuat pada tradisi kesultanan, Sri Sultan HB X dinilai telah selesai dengan ambisi politik praktis elektable, sehingga kehadirannya tidak akan menjadi ancaman rivalitas bagi Presiden Prabowo di masa depan.

Kehadiran Sultan juga diyakini mampu menghadirkan ketenangan psikologis dan mendinginkan suhu politik nasional yang sempat memanas akibat turbulensi pemakzulan.

Sri Sultan sendiri saat diminta tanggapannya mengenai mundurnya Gibran, Sultan secara bijak menekankan pentingnya stabilitas dan kedamaian.

"Ya saya punya harapan kehidupan, aktivitas berpemerintahan, dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

Di lingkaran internal kekuasaan, tersiar kabar santer bahwa sejumlah elemen pemerintah dan partai pengusung mulai melirik dan menjajaki komunikasi persuasif (lobi-lobi) dengan Sri Sultan HB …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Razia Narkoba Lapas Kerobokan, 24 Napi Positif dan Sabu 11 Gram Disita

Oleh Van · 13 Nov, 12.18 WIB



Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan. Mari bersama-sama katakan tidak pada narkotika.

JAKARTA — Razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menemukan sabu sekitar 11 gram, ekstasi, hingga alat isap atau bong.

Dalam operasi tersebut, 24 dari 36 warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan positif narkoba.

Penggeledahan melibatkan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Polda Bali, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Operasi dilakukan pada Jumat, 30 Oktober 2026, dini hari.

Sabu, Ekstasi, dan Bong Ditemukan

Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya memberantas peredaran narkotika di dalam lapas.

"Sejalan dengan arahan bapak Kapolri untuk melakukan pemberantasan narkoba melalui langkah penegakan hukum dan pengembangan jaringan mulai dari pemasok hingga bandar," ujar Pasma dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

Dari penggeledahan sejumlah area, petugas mengamankan sabu seberat 10,36 gram atau sekitar 11 gram, sekitar 5,5 butir ekstasi, serta beberapa alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.

Petugas juga menemukan 21 unit telepon genggam dan dua timbangan. Seluruh barang tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

24 Warga Binaan Positif Narkoba

Selain menggeledah kamar hunian, petugas melakukan tes urine terhadap 36 warga binaan. Hasilnya, 23 orang positif metamfetamin dan satu orang positif amfetamin, sedangkan 12 lainnya negatif.

Dengan demikian, total 24 warga binaan terindikasi positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut.

Lima warga binaan yang diduga memiliki sabu dan ekstasi kemudian dibawa ke Mapolda Bali. Mereka menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami temuan barang bukti.

Polisi Telusuri Asal Narkoba

Pasma menyebut pengembangan kasus akan dilakukan untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika, mulai dari pemasok hingga bandar.

Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana barang terlarang dapat masuk ke lingkungan lapas.

"Polri menegaskan akan terus berkomitmen melakukan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara tegas terukur dan profesional," tuturnya.

Razia tersebut menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.

Aparat gabungan juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain agar penindakan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti dan pemeriksaan warga binaan.(*)

NASIONAL

Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Nasib Usulan HMP Pemakzulan di DPR?

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.23 WIB

BANDA ACEH - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden (wapres) tidak akan dilanjutkan. Menurut Khozin, pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres membuat objek pembahasan HMP tidak lagi relevan.

"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik ijazah. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ucap Khozin.

Lebih lanjut, Khozin mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dan kepastian mekanisme pengunduran diri Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU MD3.

Dia menjelaskan, terdapat tahapan waktu bagi presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih satu dari dua nama tersebut.

"Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden," ucap Khozin.

Meski demikian, Khozin mengaku pihaknya belum mendapat informasi mengenai bentuk dan tindak lanjut surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR.

"Tadi kita sudah ketahui bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sudah hadir secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Nah, kita sampai detik ini masih belum diinformasikan seperti apa bentuk, wujud, dan sikap dari surat itu. Kita tunggu nanti arahan dari pimpinan," pungkasnya

NASIONAL

Komisi III DPR Desak Polri Terapkan Pasal Makar dan Pidana Mati Listyo Sigit CS

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.07 WIB

BANDA ACEH -Komisi III DPR RI meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk dengan menerapkan pasal makar dan ancaman pidana mati.

Dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri telah menyandang status tersangka.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bandingkan Surat Pengunduran Diri Gibran dengan Soeharto, Yusril: MPR Tidak Perlu Adakan Sidang Persetujuan

Oleh Van · 12 Nov, 18.14 WIB

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden mirip dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran memiliki kemiripan dengan surat pengunduran Soeharto, yakni sama-sama menyatakan berhenti.

Oleh karena itu, kata Yusril tidak perlu lagi bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengadakan sidang paripurna untuk membahas persetujuan mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti,” ucap Yusril kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2026.

“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Guntur Romli Sentil Relawan Gibran Dukung Dasco Jadi Wapres: Tangis Belum Kering, Sudah Berpaling

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.35 WIB



BANDA ACEH -Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan kritik terhadap sikap Andi Azwan dan Ade Darmawan yang mendadak menyatakan dukungan kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Guntur menilai, persoalan utama bukan terletak pada nama tokoh yang mereka dukung, melainkan sikap keduanya yang dinilai terlalu cepat mengalihkan dukungan setelah Gibran dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Ia juga menyoroti waktu dan tempat pernyataan dukungan tersebut disampaikan. Menurut informasi yang beredar, Andi Azwan dan Ade Darmawan menyampaikan dukungan itu pada Kamis (12/11/2026) malam, ketika keduanya masih berada di Istana Wakil Presiden, di tengah situasi Gibran yang disebut baru saja meninggalkan Jakarta untuk kembali ke Solo.

“Bukan soal nama yang mereka sebut dan dukung untuk jadi wapres pengganti, tapi bagaimana respon kawan-kawan mereka, tangis aja belum kering setelah Gibran mengundurkan diri, mereka juga ngomongnya masih di Istana Wapres, ini berdua kok bisa setega itu ya,” tulis Guntur dalam pernyataannya, Kamis (12/11/2026).

Guntur mengaku selama ini termasuk pihak yang paling keras mengkritik Gibran. Namun, ia menyayangkan sikap orang-orang yang selama ini berada di sekitar Wakil Presiden tersebut.

Menurutnya, perilaku Andi Azwan dan Ade Darmawan justru memperlihatkan persoalan dalam lingkungan relawan yang selama ini mengelilingi Gibran.

“Saya adalah orang yang paling keras kritik Gibran, tapi melihat kelakuan mereka ini, pantas saja Gibran selama ini ‘terjerumus’ dikelingi gerombolan ‘relawan’ model ini,” lanjutnya.

Guntur juga mempertanyakan konsistensi ideologi dan loyalitas orang-orang yang mengatasnamakan relawan tersebut. Ia menilai sikap keduanya menjadi gambaran bagaimana dukungan Politik dapat berubah dalam waktu singkat.

“Enggak jelas ideologi dan loyalitas orang-orang seperti ini. Benar-benar cocok 100% disebut TERMUL!!” tegas Guntur.

Pernyataan Guntur tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kritik terhadap sikap relawan Gibran tidak hanya datang dari pihak yang selama ini berseberangan dengan Wakil Presiden, tetapi juga menjadi sorotan setelah muncul dukungan kepada sosok lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

Adapun dukungan Andi Azwan dan Ade Darmawan kepada Sufmi Dasco Ahmad menjadi perhatian karena disampaikan di tengah situasi politik yang berkembang setelah kabar pengunduran diri Gibran.

Dua Die Hard Keluarga Jokowi Mendadak Nyatakan Dukung Dasco Jadi Pengganti Gibran

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PDIP: Pengganti Gibran Dari Partai Terbesar di DPR RI

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.26 WIB



BANDA ACEH - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari kelompok partai terbesar di Senayan.

Selain dari partai terbesar, sosok tersebut punya rekam jejak yang baik, sosok tersebut juga bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres.

“Sosok itu dari kelompok Politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” kata Said, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait resiko resiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra.

“Atau presiden memilih dari koalisinya tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisipun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampun teknokrasi. Masing masing opsi juga ada plus dan minusnya,” ungkap Said.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR.

“Bahkan Presiden bisa mengambil sosok yang calon wapres yang tidak terafilisasi kelompok politik, murni dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden,” ujar Said.

Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional.

Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden.

“Dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat,” ungkap Said.

Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dengan demikian, jabatan wakil presiden kosong. Sesuai ketentuan, ayat 2 pasal 8 UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EROPA

Ukraina Tangkap WNI asal Jawa jadi Tawanan Perang, Ini Wajahnya Lihat!

Oleh Redaksi · 12 Nov, 18.46 WIB

BANDA ACEH - Ukraina menyatakan telah menangkap tawanan perang pertama asal Indonesia.

Penangkapan itu, menurut pemerintah Ukraina, terjadi di tengah peningkatan perekrutan WNI oleh Rusia untuk dijadikan tentara di garis depan pertempuran.

Pria berusia 49 tahun yang berasal dari Jawa Timur itu dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk ikut serta militer Rusia dalam serangan ke Ukraina.

Menurut pemerintah Ukraina, gugus tempur pria tersebut diserang drone militer Ukraina sehingga mereka kocar-kacir. Dia sempat bergerak tak tentu arah selama beberapa hari, tapi kemudian ditangkap oleh pasukan Ukraina.

Berdasarkan data pemerintah Ukraina, pria itu merupakan salah satu 283 WNI yang direkrut militer Rusia selama Januari hingga September 2026 untuk bertempur melawan Ukraina.

Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan periode 2023-2025. Selama kurun waktu itu, jumlah WNI yang direkrut militer Rusia tidak pernah melebihi 10 orang.

Penangkapan pria itu dikonfirmasi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang.

"Kemlu RI telah mendapatkan informasi terdapat penangkapan satu orang WNI dengan insial AS oleh otoritas Ukraina. Saat ini KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut," ujar Yvonne dalam konferensi pers pada Rabu (11/11).

Dia menambahkan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik agar pemerintah Rusia menghentikan perekrutan WNI dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.

"Sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi dan kerja sama erat dengan pihak Rusia untuk mencegah kasus ini terulang lagi di kemudian hari," jelasnya.

Pria berinisial AS berasal dari Blitar, Jawa Timur.

Pada 27 Mei 2026, mantan teman sekolahnya yang berinisial AA, menawarinya pekerjaan konstruksi bangunan sipil di Rusia dengan sistem kontrak.

Adapun AA bertindak atas perintah seseorang bernama Alexander, yang merekrut orang-orang untuk dikirim ke Rusia. Alexander pula yang mengatur keberangkatan AS.

Pada 22 Juli, AS bersama seseorang berinisial CK terbang ke Moskow. Di sana mereka ditempatkan di sebuah apartemen bersama dua warga Rusia.

Setelah itu, AS menandatangani kontrak pekerjaan yang dia kira konstruksi berdurasi satu tahun.

Namun pada kenyataannya, kontrak tersebut mengharuskan AS bekerja sebagai tentara untuk Kementerian Pertahanan Rusia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

The Pade Hotel Dukung Pelantikan SMSI Aceh Besar, Media Berperan Promosikan Daerah

Oleh Redaksi · 12 Nov, 20.01 WIB

ACEH BESAR – Manajemen The Pade Hotel Aceh Besar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar masa bakti 2026–2029 yang dirangkai dengan kegiatan SMSI Aceh Besar Awards 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, di The Pade Hotel, Aceh Besar.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh General Manager (GM) The Pade Hotel Aceh Besar, Reckyanto Mella, Kamis (12/11/2026). Ia menyambut positif kehadiran SMSI di Aceh Besar dan berharap organisasi perusahaan media siber tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam mempromosikan potensi daerah.

Menurut Reckyanto, media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra positif suatu daerah melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan konstruktif.

Publikasi yang luas mengenai potensi wisata, budaya, kuliner, hingga fasilitas perhotelan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Aceh Besar bagi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Oleh Redaksi · 13 Nov, 08.57 WIB



BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Dalam pengungkapan itu, nama TK turut muncul karena diduga diperintahkan melakukan surveillance atau pengawasan.

Mengawali pemaparannya, Suyudi menyebut bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli.

"Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," ungkap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Selain itu, penyidik Polri juga telah menyita sejumlah barang bukti, mulai dari telepon genggam hingga perangkat komputer dan dokumen.

"Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan," kata Suyudi.

Suyudi kemudian membeberkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Adapun target tersebut mencakup Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai Politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran tidak serta-merta terlibat dalam tindak pidana.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegasnya.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yakni LSP (Listyo Sigit Prabowo), SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi Santoso) dan AS (Ahrie Sonta). Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan ilegal.

Suyudi mengurai bahwa LSP yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabagmon (Kabag Monitoring) AS.

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," urainya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rektor Universitas Paramadina: Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.01 WIB



Mantan Presiden Republik Indonesia dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia lagu duduk bareng. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengkritik praktik pewarisan kekuasaan Politik melalui anggota keluarga yang dinilainya dapat merusak demokrasi.

Didik menilai fenomena politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak dapat dilepaskan dari ambisi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Gibran menjadi bagian dari eksperimen politik dinasti yang dibangun melalui dukungan dan pengaruh kekuasaan Jokowi.

"Dalam pilihan ini Gibran menjadi kelinci percobaan, merupakan eksperimen politik dinasti dan pewarisan politik melalui dukungan politik kekuasaan pasca-kekuasaan tersebut," ujar Didik pada Jumat, 13 November 2026.

Dia berpandangan, praktik pewarisan kekuasaan semacam itu merupakan persoalan serius bagi demokrasi karena kepentingan keluarga penguasa dapat bercampur dengan kepentingan negara.

Didik bahkan menyebut praktik tersebut sebagai penyakit demokrasi.

"Praktek politik dan pewarisan kekuasaan seperti ini menjadi bagian dari penyakit demokrasi karena jalur yang dipilih menyelingkuhi konstitusi," tegasnya.

Didik mengatakan, demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk berkompetisi dalam politik.

Proses pembentukan kepemimpinan nasional juga semestinya bertumpu pada kapasitas, rekam jejak, dan perjuangan politik.

Dia menilai, ketika kekuasaan digunakan untuk memuluskan kepentingan keluarga, prinsip-prinsip tersebut berisiko terabaikan.

"Persoalan dinasti politik bukan semata-mata menyangkut siapa yang menduduki jabatan publik, melainkan juga bagaimana kekuasaan diperoleh dan digunakan," demikian Didik menambahkan.

ACEH

BBPOM Aceh Edukasi Pelajar tentang Penggunaan Obat Bijak dan Kosmetik Aman

Oleh Redaksi · 12 Nov, 23.05 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) memberikan edukasi kepada siswa SMA Negeri 4 Banda Aceh melalui kegiatan kunjungan edukatif.

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal tugas dan fungsi BPOM, memahami bahaya penyalahgunaan obat dan NAPZA, serta meningkatkan pengetahuan tentang cara memilih dan menggunakan kosmetik yang aman, Kamis (12/11/2026).

Kepala bagian tata usaha BBPOM di Marina Kaptriani yang dalam hal ini mewakili kepala BPOM Aceh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPOM, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai konsumen.

"Generasi muda harus semakin cerdas dan bijak dalam memilih serta menggunakan produk. Jangan sampai tergiur oleh iklan atau tren tanpa memastikan keamanan produk yang digunakan," ujar Marina.

Ia berharap kegiatan edukasi tersebut tidak hanya menjadi kesempatan bagi para siswa untuk memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membangun kesadaran dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar.

"Jadilah generasi yang cerdas dalam memilih, bijak dalam menggunakan obat, berani menolak NAPZA, serta peduli terhadap keamanan kosmetik. Sebab, menjaga kesehatan hari ini merupakan salah satu langkah untuk meraih masa depan yang lebih baik," pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelayanan Publik BBPOM di Desi Arianti Ningsih, memberikan edukasi mengenai keamanan kosmetik melalui materi Tampil Menawan dengan Kosmetik Aman. Dalam pemaparannya, Desi menjelaskan pengertian kosmetik, jenis-jenis kosmetik, bahan yang dilarang dalam kosmetik, serta dampak penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya.

Ia mengingatkan para siswa agar mewaspadai penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, serta pewarna yang dilarang. Bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan, mulai dari iritasi dan kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan lainnya.

Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet melalui penggunaan sunscreen yang tepat. Pemilihan produk perlu memperhatikan nilai SPF dan PA serta cara penggunaan yang benar agar perlindungan terhadap kulit lebih optimal.

Desi turut mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan kosmetik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Dalam Islam, Pemimpin yang Tak Lagi Kompeten Wajib Mundur? Ini Penjelasan Ulama

Oleh Redaksi · 12 Nov, 18.14 WIB

Pengunduran diri seorang pejabat sering kali dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan dalam mempertahankan kekuasaan. Padahal, dalam perspektif Islam, keputusan mundur dari jabatan justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab dan kesadaran terhadap amanah yang diemban.Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kehormatan yang harus dipertahankan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kemampuan, keadilan, dan tanggung jawab.

Karena itu, seorang pemimpin tidak sepatutnya mempertahankan kekuasaan apabila sudah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, dalam kondisi tertentu, melepas jabatan menjadi kewajiban demi mencegah kerusakan yang lebih besar.

Abu Bakar Al-Khawarizmi dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum menjelaskan bahwa pengunduran diri seorang pejabat diperbolehkan apabila terdapat kondisi yang menghambat kemampuannya dalam menjalankan kepemimpinan, misalnya sakit yang berdampak pada produktivitas dan kinerjanya. Terlebih apabila terdapat sosok lain yang lebih mampu untuk mengisi posisi tersebut.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan seorang pemimpin untuk mempertahankan jabatan secara membabi buta. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Dalam kehidupan sosial, pengunduran diri seorang pejabat terkadang dipandang sebagai bentuk kekalahan, kelemahan, bahkan kehinaan. Padahal, keputusan tersebut bisa menjadi bukti kedewasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin.

Setiap bidang pekerjaan membutuhkan kompetensi yang sesuai. Seorang pebisnis harus memiliki kemampuan dalam mengelola usaha. Begitu pula seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas dan kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Ketika seorang pejabat tidak lagi memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin, mempertahankan jabatan justru berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Minta Doa Rakyat agar Kuat Pikul Amanah Besar sebagai Pemimpin Negara

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.14 WIB



BANDA ACEH - - Presiden Prabowo Subianto meminta doa masyarakat dan para pemuka agama agar dirinya bersama seluruh pemimpin negara mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab memimpin bangsa. Prabowo menegaskan, doa dan pertolongan Allah SWT menjadi kekuatan penting dalam menjalankan tugas besar tersebut.

Pesan itu disampaikan Prabowo melalui sambutan tertulis yang dibacakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman dalam acara Doa dan Munajat untuk Kemaslahatan Bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis malam (12/11/2026).

Dalam pesannya, Prabowo mengaku tersentuh atas doa yang dipanjatkan masyarakat dan para tokoh agama untuk dirinya serta para pemimpin negeri.

"Laporan Menteri Agama tadi saya dengarkan dengan hati yang tersentuh. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan untuk saya dan para pemimpin negeri ini. Saya tidak meminta pujian, yang saya butuhkan adalah doa," demikian pesan Prabowo yang dibacakan Dudung.

Prabowo menyadari bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin negara bukanlah amanah ringan. Menurutnya, tidak ada pemimpin yang mampu menjalankan tanggung jawab besar tersebut hanya dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri.

"Sebab, saya sadar tanpa pertolongan Allah, tidak ada pemimpin yang mampu memikul amanah sebesar ini sendirian," katanya dalam sambutan.

Selain meminta doa, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Dia menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan bagi masyarakat untuk saling bermusuhan.

Menurut Prabowo, kekuatan Indonesia justru terletak pada kemampuan masyarakat menjaga persatuan meski memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda.

Prabowo juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong dan fitnah yang beredar, terutama melalui media sosial. Dia mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

"Saya meminta seluruh rakyat Indonesia untuk tidak mudah diadu domba. Jangan mudah percaya pada kabar bohong dan fitnah, terutama yang beredar di media sosial. Periksa kebenarannya terlebih dahulu," pesannya.

Dia menegaskan, perbedaan pilihan, pendapat, maupun keyakinan tidak boleh memecah belah bangsa. Persatuan Indonesia harus tetap dijaga sebagai tanggung jawab seluruh masyarakat.

"Indonesia tidak boleh pecah. Indonesia tidak boleh diadu domba. Indonesia harus tetap bersatu," kata Prabowo dalam pesannya.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pemuka agama untuk terus berperan sebagai penyejuk dan pemersatu umat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aparat Penegak Hukum Diminta Lanjutkan Pengusutan Suket Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 13 Nov, 08.54 WIB



BANDA ACEH -Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan pengusutan persoalan hukum surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan, pengunduran diri Gibran hanya menyangkut jabatan Politik dan tidak menghapus konsekuensi hukum atas persoalan yang mendahuluinya.

“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 November 2026.

Yopis menilai, persoalan tersebut kini menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara. Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Ia pun mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan putusan MA dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Selain itu, pihak maupun institusi yang bertanggung jawab atas penerbitan surat tersebut harus diusut.

“Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi,” tegas Yopis.

Di sisi lain, meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR, proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suket tersebut harus tetap berjalan hingga tuntas.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Surat tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup selama sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Muzani, Gibran menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Pimpinan Majelis menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Muzani.

EDUKASI

Bantu Pelajar Difabel Rancang Masa Depan, ABC Indonesia Gelar Program Mentorship

Oleh Van · 12 Nov, 17.37 WIB

JAKARTA — Sebanyak 10 pelajar disabilitas menyelesaikan program INSPIRE Mentorship yang digelar PT Heinz ABC Indonesia bersama Yayasan Helping Hands (YHH).

Program pendampingan selama tiga bulan ini membantu siswa SMA difabel mempersiapkan masa depan setelah lulus sekolah.

“Anak-anak Indonesia memiliki potensi terbaik yang perlu kita jaga dan kembangkan,” ujar People & Performance Director PT Heinz ABC Indonesia, Dina Sitopu.

Dina menyebut program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberagaman dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam program ini, karyawan ABC Indonesia berperan sebagai mentor untuk mendampingi siswa mengenali potensi dan merencanakan langkah berikutnya.

Akses Pendidikan Masih Menjadi Tantangan

Kebutuhan pendampingan tersebut tergambar dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Pendidikan 2024.

Sebanyak 22,17 persen penyandang disabilitas tercatat menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Hanya 5,58 persen yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Direktur Yayasan Helping Hands, Wendy Kusumowidagdo, mengatakan program ini hadir untuk menjawab minimnya akses anak difabel terhadap dunia profesional.

Ia mengapresiasi kolaborasi dengan ABC Indonesia karena memberikan pengalaman praktis bagi peserta. “Kontribusi nyata dalam membagikan pengetahuan serta pengalaman praktis” dinilai penting untuk membangun kepercayaan diri mereka.

Mentor dan Siswa Sama-Sama Belajar

Salah satu pasangan dalam program ini adalah Baiq Rahmi, karyawan ABC Indonesia, yang mendampingi Aqsyal Rusli dari SLB Pembina Tingkat Nasional.

Aqsyal berencana melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Pendidikan Luar Biasa. Pendampingan tersebut membantunya mempersiapkan rencana studi.

Baiq mengaku mendapat pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi pelajar disabilitas. “Saya dapat memahami lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi pelajar disabilitas,” ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

FEBI UIN Ar-Raniry Bekali Mahasiswa KPM dengan Aplikasi SIGAP

Oleh FEBI · 12 Nov, 17.50 WIB

BANDA ACEH – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh membekali mahasiswa peserta Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) SIGAP dengan pelatihan penggunaan Aplikasi SIGAP di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengelola data dan mendukung pemberdayaan masyarakat gampong selama pelaksanaan pengabdian.

Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M., mengatakan bahwa KPM merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Menurutnya, mahasiswa harus menjadikan KPM sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik.

Mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan gagasan, membangun kolaborasi, serta menjaga integritas dan nama baik almamater selama berada di tengah masyarakat.

Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.

Ia mengingatkan peserta agar mampu berkomunikasi dengan baik, beradaptasi dengan lingkungan, serta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Presiden Prabowo Didesak Evaluasi Menteri Trenggono

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.07 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mengevaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait penggunaan influencer dengan biaya fantastis yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra di tengah masih maraknya kesulitan nelayan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Menurut Eko, hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa.

"APBN adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat, bukan pula anggaran untuk membangun pasukan pembela kekuasaan di media sosial. Jangan sampai uang rakyat justru digunakan untuk membayar influencer demi memoles citra pejabat dan menyerang masyarakat yang kritis terhadap pemerintah," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 12 November 2026.

Lanjut dia, KKP seharusnya memprioritaskan anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat sektor perikanan, menjaga kedaulatan laut, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

“Bukan justru muncul dugaan penggunaan anggaran negara untuk aktivitas komunikasi Politik yang berpotensi menyimpang dari kepentingan publik,” ungkapnya.

Gema Nasional meminta Presiden Prabowo tidak bersikap pasif dan segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran komunikasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Eko juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran negara.

"Jangan sampai pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran, sementara di sisi lain muncul dugaan uang rakyat digunakan untuk kepentingan pencitraan pejabat. Rakyat membutuhkan bukti kerja, bukan pasukan influencer. Rakyat membutuhkan kebijakan yang berpihak, bukan propaganda yang dibiayai APBN," sambungnya.

Lebih jauh, Eko menegaskan bahwa jabatan menteri merupakan amanah konstitusional untuk melayani rakyat, bukan fasilitas untuk membangun kekuatan opini di ruang digital.

Gema Nasional memberikan penegasan bahwa kritik masyarakat, mahasiswa, aktivis, dan kelompok sipil merupakan bagian penting dari demokrasi.

“Jangan sampai kritik justru dihadapi dengan praktik penggiringan opini yang menggunakan uang negara,” jelasnya.

"Jika dugaan tersebut terbukti, Presiden Prabowo harus berani mengambil tindakan tegas dengan mencopot Menteri KP. Jangan sampai ketegasan pemerintah hanya berlaku kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika menyangkut pejabat di lingkaran kekuasaan," tambah Eko menegaskan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.00 WIB



BANDA ACEH -Markas Besar (Mabes) Polri buka suara terkait sosok berinisial TK yang disebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa sosok tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny dalam keterangan resmi pada Kamis, 12 November 2026.

Kini, Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.

Di sisi lain, Johnny menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan guna memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Adapun, awal mula kemunculan sosok Brigjen TK saat Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.

ACEH

BBPOM Aceh Kenalkan Laboratorium Pengujian kepada Mahasiswa UIN Ar-Raniry

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.38 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) menerima kunjungan edukasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Rabu (11/11/2026).

Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal peran laboratorium pengujian dalam mendukung pengawasan obat dan makanan, termasuk proses identifikasi dan analisis bahan kimia berbahaya.

Kepala BBPOM di Riyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengujian laboratorium merupakan bagian penting untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

“Laboratorium berperan penting dalam pengawasan obat dan makanan melalui pengujian berbagai parameter dan bahan berbahaya dengan metode serta instrumen analisis yang didukung tenaga kompeten untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya,” ujar Riyanto.

Ia menjelaskan, laboratorium pengujian BBPOM di Banda Aceh didukung berbagai instrumen analisis dan tenaga penguji kompeten serta menerapkan standar ISO/IEC 17025, ISO 9001, dan ISO 31000 untuk mendukung kompetensi laboratorium, sistem manajemen mutu, dan pengelolaan risiko.

Riyanto berharap kunjungan tersebut dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengenal proses pengujian laboratorium sekaligus menghubungkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapannya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Mutu BBPOM di Nurlinda Lubis, memperkenalkan fungsi dan ruang lingkup laboratorium pengujian, mulai dari laboratorium pangan, obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik (OBASKK), kosmetika, hingga mikrobiologi.

“Penerapan sistem manajemen mutu sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pengujian berjalan sesuai standar sehingga menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipercaya,” jelas Nurlinda.

Dalam pemaparannya, mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai parameter pengujian, seperti identifikasi formalin dan boraks pada pangan, deteksi bahan kimia obat, pengujian merkuri pada kosmetik, serta pemeriksaan cemaran mikroba. Berbagai instrumen analisis, di antaranya HPLC, AAS, ICP-OES, GC, dan GC-MS, turut diperkenalkan sebagai peralatan pendukung pengujian laboratorium.

Selain itu, mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pengujian, mulai dari preparasi sampel hingga analisis hasil, serta pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan laboratorium.

Melalui kunjungan edukasi ini, BBPOM di Banda Aceh berharap mahasiswa UIN Ar-Raniry memperoleh wawasan dan pengalaman mengenai penerapan ilmu pengetahuan dalam pengujian obat dan makanan, sekaligus memahami pentingnya hasil pengujian laboratorium yang valid sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat.[]

EDUKASI

DWP Aceh Barat Gelar Edukasi dan Lomba Olahan Daun Kelor

Oleh Biro Meulaboh · 12 Nov, 15.55 WIB

MEULABOH– Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr Kurdi ST, MT, MH, mewakili Bupati Aceh Barat membuka kegiatan edukasi dan kompetisi kudapan berbahan daun kelor yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Barat di Kafe Seulawah, Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis (12/11/26).

Kegiatan bertema “Satu Daun Dua Kekuatan: Keluarga Sehat, Perempuan Berdaya” tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota DWP dalam mengolah potensi pangan lokal menjadi produk bernilai tambah.

Dalam sambutannya, Kurdi mengatakan daun kelor merupakan salah satu bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan memiliki kandungan gizi baik. Namun, pemanfaatannya perlu didukung pengetahuan serta inovasi agar dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana edukasi dan peningkatan kapasitas perempuan dalam mengembangkan kreativitas.

Ia mendorong anggota DWP untuk berinovasi dengan memperhatikan kualitas, cita rasa, tampilan, hingga kemasan produk agar memiliki daya tarik dan nilai jual.

“Jangan hanya terpaku pada cara pengolahan yang biasa dilakukan. Ciptakan variasi baru sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi,” ujar Kurdi.

Sementara itu, Ketua DWP Aceh Barat, Cut Zulfahnur Syafitri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang ekonomi, khususnya pemberdayaan melalui pengolahan daun kelor.

Kegiatan ini diikuti 37 DWP organisasi perangkat daerah (OPD). Pelaksanaannya terdiri atas dua tahapan, yakni edukasi dengan menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis, dilanjutkan kompetisi produk …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Brigjen Tory Kristianto, Alumni Akpol 1996 yang Pernah Amankan Pilkada

Oleh Redaksi · 13 Nov, 10.23 WIB



BANDA ACEH - Brigjen Pol Tory Kristianto, S.I.K., perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996, resmi dimutasi dari jabatan Direktur Polisi Satwa (Dirpolsatwa) Korps Sabhara Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Ia digantikan oleh Brigjen Pol Johanson Ronald Simamora di posisi Dirpolsatwa.

Riwayat Karier

Brigjen Pol Tory Kristianto dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang operasional dan Brigade Mobil (Brimob). Berikut beberapa jabatan yang pernah diembannya:

- Kasat Brimob Polda Kepulauan Riau (2017)
- Dansat Brimob Polda Jawa Tengah (2020)
- Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korp Brimob Polri (2021)
- Dirreskrimsus Polda Jambi (2022)
- Karoops Polda Kalimantan Tengah (Maret 2023)
- Karoops Polda Metro Jaya (Desember 2023)

Selama menjabat Karoops Polda Metro Jaya, ia terlibat dalam pengamanan Pemilu 2024, termasuk persiapan pengamanan kotak suara pada Januari 2024, serta Operasi Mantap Praja yang dimulai 1 Agustus 2024 untuk mengamankan Pilkada Serentak.

Jabatan Dirpolsatwa yang sebelumnya diembannya merupakan posisi strategis di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri yang berkaitan dengan pemanfaatan satwa dalam mendukung tugas operasional kepolisian.

Rotasi Organisasi

Mutasi November 2026 ini merupakan bagian dari rotasi besar-besaran terhadap 264 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas tugas kepolisian.

Penempatan Tory Kristianto sebagai Widyaiswara di Sespim Lemdiklat Polri menandai pergeseran fokus dari jabatan operasional ke bidang pendidikan dan pengembangan personel.

Artikel ini disusun berdasarkan data publik yang tersedia hingga November 2026. Informasi lebih rinci mengenai biodata pribadi atau prestasi spesifik di luar jabatan resmi masih terbatas di media terbuka.

NASIONAL

Putri Megawati Digadang-Gadang Gantikan Gibran Sebagai Wapres

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.29 WIB



BANDA ACEH - Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) digadang-gadang bakal menduduki jabatan Wakil Presiden RI, menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut sumber monitorindonesia.com di DPR RI, Jumat (13/11/2026), Puan Maharani adalah sosok yang pas mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pas itu Puan Maharani jadi Wakil Presiden," ungkap sumber itu.

Disebutkan, dipilihnya Puan Maharani sebagai Wapres tak lain untuk mengakomodir dan merangkul semua pihak.

"Misinya adalah untuk mengakomodir semua pihak sehingga konsolidasi dan rencana pemerintah bisa berjalan dengan baik. Kalau Wapresnya dari partai koalisi Prabowo, akan terjadi gesekan," ungkap sumber tersebut.

Apa yang disampaikan oleh sumber tersebut juga sejalan dengan keinginan PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah secara terang-terangan dan terbuka mengusulkan sosok pengganti Gibran berasal dari partai terbesar di parlemen atau DPR RI. Sosok itu tak lain, tak bukan adalah Puan Maharani.

"Sosok itu dari kelompok Politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," kata Said, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

EKONOMI

Dua Tahun Menjabat Wapres, Harta Kekayaan Gibran Naik Rp2,33 Miliar

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.16 WIB

BANDA ACEH - Resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp27.915.654.176 (Rp27,91 miliar) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025.

Berdasarkan penelusuran RMOL yang dikutip HARIANAEH.co.id. Di laman e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 12 November 2026, laporan tersebut disampaikan pada 23 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap.

Dalam laporan itu, jabatan Gibran tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Angka tersebut meningkat dibandingkan laporan periodik 2024 yang mencatat kekayaan Gibran sebesar Rp27.519.975.620 (Rp27,51 miliar).

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp395.678.556 atau sekitar Rp395,67 juta dalam setahun.

Jika dibandingkan dengan laporan periodik 2020, harta kekayaan Gibran mengalami kenaikan sekitar Rp6,76 miliar.

Saat itu, total kekayaannya tercatat sebesar Rp21.152.810.130 (Rp21,15 miliar).

Dalam data e-LHKPN, kekayaan Gibran tercatat sebesar Rp25.297.783.659 (Rp25,29 miliar) pada 2021, kemudian naik menjadi Rp26.032.674.370 (Rp26,03 miliar) pada 2022.

Pada 2023, laporan periodiknya mencatat Rp25.576.015.455 (Rp25,57 miliar).

Sementara laporan khusus calon Wakil Presiden yang disampaikan pada 24 Oktober 2023 mencatat Rp25.545.215.362 (Rp25,54 miliar).

Selanjutnya, pada 2024 total kekayaan Gibran tercatat Rp27.519.975.620 (Rp27,51 miliar) hingga meningkat menjadi Rp27.915.654.176 (Rp27,91 miliar) pada laporan periodik 2025.

Dalam laporan periodik 2025, harta Gibran paling besar berupa tanah dan bangunan senilai Rp17,44 miliar.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 500/300 meter persegi di Surakarta senilai Rp6 miliar.

Kemudian ada dua bidang tanah dan bangunan masing-masing seluas 2.000/2.000 meter persegi di Sragen, dengan nilai masing-masing Rp2,6 miliar.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 112/112 meter persegi di Surakarta senilai Rp1,5 miliar.

Ada pula tanah seluas 113 meter persegi di Surakarta senilai Rp700 juta, tanah seluas 896 meter persegi senilai Rp1,792 miliar, serta tanah seluas 1.124 meter persegi senilai Rp2,248 miliar.

Untuk alat transportasi dan mesin, Gibran melaporkan kekayaan sebesar Rp286,5 juta.

Aset tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, serta Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta.

Kemudian mobil Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Pimpin Upacara HKN ke-62, Sejumlah Kabupaten dan Kader Kesehatan Raih Penghargaan

Oleh Redaksi · 12 Nov, 14.47 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Aceh, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan amanat Menteri Kesehatan (Menkes) RI yang menekankan pentingnya transformasi kesehatan nasional dengan mengutamakan pencegahan penyakit dan menjaga masyarakat tetap sehat, bukan sekadar mengobati ketika sakit.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Program ini juga mendeteksi lebih dari delapan juta warga yang mengalami hipertensi atau diabetes, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit, termasuk Tuberkulosis (TB), melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, penguatan rumah sakit rujukan, serta perluasan jaminan kesehatan.

Menkes menyampaikan, keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas dan jumlah masyarakat yang diperiksa, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

"Keberhasilan transformasi kesehatan bukan sekadar diukur dari fasilitas yang dibangun atau masyarakat yang diperiksa, melainkan dari semakin banyaknya rakyat yang hidup sehat, produktif, dan berkualitas," demikian kutipan amanat Menkes yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sudah Diuji Puslabfor, Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Uji Forensik Ulang

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.38 WIB



BANDA ACEH - Mabes Polri buka suara terkait permintaan pengujian ulang ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) oleh kubu Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa ijazah Jokowi sudah melalui pemeriksaan forensik di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, sehingga tidak perlu diuji ulang.

Seluruh hasil pengujian itu sudah masuk dalam berita acara pro justitia, dan Trunoyudo memastikan bahwa pengujian dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional.

Hasil uji forensik yang menjadi bagian dalam kelengkapan berkas perkara penyidikan juga telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan," kata dia dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (13/11).

Lantaran uji forensik ijazah Jokowi sudah dilakukan, jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa tidak perlu lagi dilakukan uji forensik ulang terhadap ijazah tersebut.

Mengingat objek tersebut sudah diuji keabsahannya dan hasil pengujiannya telah dituangkan dalam dokumen resmi.

"Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut," ucap Trunoyudo.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazah asli S1 miliknya. Momen itu terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11).

Kepada majelis hakim, Jokowi memohon izin agar diperkenankan menunjukkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut.

"Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya," kata dia di muka persidangan.

Setelah diizinkan oleh majelis hakim, Jokowi lantas berdiri dan membalikan badan ke arah pengunjung sidang. Dia kemudian menunjukkan satu per satu dokumen ijazah yang dia bawa.

Meski sudah dihadirkan dalam persidangan, pihak Roy Suryo meminta agar ijazah tersebut diuji ulang di muka persidangan.

Di sisi lain, Jokowi keberatan dengan hal itu karena ijazahnya sudah pernah diuji oleh Puslabfor Polri dalam proses hukum yang sudah berjalan

ACEH

5 BERITA

ACEH

Peserta Olimpiade PAI Aceh Barat Siap Berlaga di Grand Final Nasional

Oleh Biro Meulaboh · 13 Nov, 20.08 WIB



DPD AGPAII Aceh Barat melakukan audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan instansi terkait guna menyampaikan prestasi serta memohon dukungan,FOTO/HAI

MEULABOH – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Aceh Barat melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta sejumlah pejabat terkait untuk memperkuat dukungan bagi peserta yang meraih juara nasional dan lolos ke Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) Nasional 2026.

Audiensi yang berlangsung Jumat (13/11/2026) tersebut turut melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah kepala sekolah terkait.

Grand Final Olimpiade PAI Nasional dijadwalkan berlangsung pada 22–24 November 2026 di Provinsi Lampung.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P M.M, menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang berprestasi, termasuk dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung anak-anak Aceh Barat yang telah meraih prestasi nasional dan lolos ke Grand Final Olimpiade PAI 2026 di Lampung. Ini menjadi kebanggaan daerah sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan berprestasi," ujar Tarmizi.

Ia berharap seluruh peserta mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan penampilan terbaik demi membawa nama baik Aceh Barat.

Sementara itu, Ketua DPD AGPAII Aceh Barat, Syahwaluddin, MA, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian para peserta. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan dan kerja sama antara peserta didik, guru, sekolah, orang tua, serta dukungan berbagai pihak.

"Kami sangat bersyukur atas capaian anak-anak Aceh Barat. Dukungan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait menjadi motivasi besar bagi peserta untuk tampil maksimal di Grand Final Nasional. Harapan kami, mereka mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Aceh Barat di tingkat nasional," ungkap Syahwaluddin.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh kepala sekolah atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung prestasi pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam.

Dengan semangat dan dukungan bersama, para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik serta membawa pulang prestasi membanggakan bagi Kabupaten Aceh Barat pada Olimpiade PAI Nasional 2026 di Lampung.[]

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Quick Wins Kapolri, Wakapolda Aceh Tanam Pohon di Dayah Abu Sibreh

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.30 WIB



BANDA ACEH — Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman bersama sejumlah pejabat utama Polda Aceh menanam pohon di lingkungan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (13/11/2026).

Penanaman pohon yang merupakan bagian dari program Green Policing Quick Wins Kapolri tersebut turut diikuti Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Tgk. Faisal Ali, Kapolres Aceh Besar, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Aceh juga menyerahkan bantuan sembako, meninjau sejumlah bangunan di kompleks dayah, serta berinteraksi langsung dengan para santri.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, Green Policing merupakan bagian dari program Quick Wins Kapolri sekaligus wujud komitmen Polri, khususnya Polda Aceh, dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

“Hari ini, Wakapolda Aceh bersama pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah dan masyarakat melaksanakan penanaman pohon sebagai bagian dari program prioritas Kapolri. Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujar Joko yang turut mendampingi Wakapolda Aceh dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap program Green Policing dapat menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk menanam dan merawat pohon sehingga tercipta lingkungan yang hijau, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Sementara itu, Tgk. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh mengapresiasi dan mendukung program Green Policing Polda Aceh. Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam sekaligus tanggung jawab bersama.

“Kami mengajak seluruh santri dan masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga hutan, menanam pohon, menjaga kebersihan, serta mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk mencintai kebersihan dan menjaga kemaslahatan alam. Mari kita dukung Green Policing Polda Aceh demi terwujudnya Aceh yang hijau, bersih, dan lestari,” ujar Abu Sibreh yang juga menjabat Ketua MPU Aceh.[]

ACEH

Dobrak Keterbatasan Layanan, ATM BBPOM Aceh Jadi Role Model KemenHAM RI di MPP

Oleh Redaksi · 13 Nov, 15.01 WIB



BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) berbagi pengalaman dan praktik baik inovasi pelayanan publik kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui kegiatan Sharing Inovasi Layanan Publik yang dilaksanakan secara daring, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KemenHAM RI melakukan benchmarking terhadap instansi pemerintah yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kegiatan dipandu oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widi Krisnowahadi, dan diikuti oleh 11 peserta dari KemenHAM RI dan BBPOM Aceh.

Pertemuan ini bertujuan memperoleh informasi, pengalaman, serta praktik baik mengenai inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM (ATM BPOM), sebagai referensi dalam rencana integrasi layanan KemenHAM ke dalam penyelenggaraan MPP di daerah.

Dalam sambutannya, Widi menyampaikan apresiasi terhadap inovasi ATM BPOM yang digagas BBPOM Aceh. Ia juga menunjukkan ketertarikan terhadap inovasi Sanger Ureueng Aceh, yang dinilai memiliki keunikan karena mengangkat kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai pendekatan dalam edukasi dan pelayanan publik.

Paparan materi disampaikan oleh Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Tim Program Prioritas Nasional BBPOM Aceh sekaligus Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan penanggung jawab inovasi ATM BPOM.

Dalam paparannya, Desi menjelaskan latar belakang pengembangan inovasi, mekanisme pelaksanaan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, tata kelola kerja sama dengan pemerintah daerah, hingga dampak inovasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

ATM BPOM merupakan inovasi pelayanan publik jarak jauh yang memanfaatkan teknologi doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah antara petugas BPOM Aceh dengan masyarakat di MPP. Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan keterbatasan jangkauan layanan BBPOM Aceh yang belum dapat hadir secara langsung di seluruh MPP di Provinsi Aceh.

Melalui perangkat ATM BPOM, masyarakat dan pelaku usaha cukup menekan tombol bel untuk terhubung dengan petugas BBPOM Aceh dan memperoleh layanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan secara langsung. Perangkat ini juga dilengkapi barcode yang memuat informasi terkait layanan BPOM sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah.

Desi turut menjelaskan tahapan pengembangan dan penerapan ATM BPOM, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola MPP, pembahasan lokasi serta kebutuhan sarana prasarana, penyusunan perjanjian kerja sama …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Komisi II DPRK Dorong Pemko Banda Aceh Optimalkan Instalasi SPALD-T Gampong Jawa

Oleh Redaksi · 13 Nov, 14.33 WIB



BANDA ACEH – Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang berada di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, tepatnya di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ketua Komisi II DPRK M Zidan Al Hafidh, mendorong Pemko Banda Aceh untuk mengkaji dan meninjau lebih mendalam mengenai SPALD-T yang dibangun dengan anggaran pusat untuk warga Banda Aceh ini.

Katanya, SPALD-T merupakan fasilitas yang berfungsi mengolah limbah domestik dari masyarakat secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan dan sumber air tanah.

Menurutnya, keberadaan SPALD-T seharusnya menjadi salah satu solusi pengelolaan limbah yang lebih aman dan terpadu. Bahkan, jika beroperasi secara optimal, fasilitas tersebut berpeluang memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota.

Namun, kata Zidan, pemanfaatan instalasi yang dibangun menggunakan anggaran APBN dengan nilai investasi sekitar Rp 200 miliar, termasuk kebutuhan lahannya, hingga kini belum berjalan maksimal.

Zidan menyebutkan, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas layanan hingga 5.000 pengguna. Akan tetapi, saat ini jumlah pelanggan yang memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, di antaranya Polresta Balai Kota, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama belum optimalnya operasional SPALD-T adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan tersebut.

Karena itu, Komisi II meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi agar pembangunan jaringan pipa SR segera direalisasikan.

"Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya," ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).

Politisi muda PAN itu juga menyoroti beban operasional SPALD-T yang saat ini masih mencapai sekitar Rp 300 juta dan harus ditanggung melalui APBK Banda Aceh.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah apabila instalasi tidak segera dimanfaatkan secara optimal. Padahal, anggaran sebesar itu dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik lainnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Rektor UIN Ar-Raniry Paparkan Transformasi Digital PPID dalam Uji Publik KIP 2026

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.55 WIB



JAKARTA – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Prof Mujiburrahman memaparkan pengembangan layanan digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam presentasi di hadapan panelis KIP, Mujiburrahman yang juga bertindak sebagai Atasan PPID UIN Ar-Raniry menjelaskan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah dilakukan universitas untuk meningkatkan transparansi informasi serta memudahkan masyarakat mengakses informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar mengejar hasil penilaian tahunan. Prinsip tersebut harus diterapkan dalam penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar untuk uji publik, tetapi denyut nadi tata kelola UIN Ar-Raniry secara berkelanjutan,” ujar Mujiburrahman.

Salah satu langkah yang dipaparkan adalah pengembangan portal PPID melalui laman ppid.ar-raniry.ac.id yang mulai dirintis sejak 2025.

Pengembangan layanan tersebut diikuti peningkatan jumlah dokumen dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Pada 2025, dokumen yang tersedia berjumlah 45, kemudian meningkat menjadi 74 dokumen pada 2026 atau bertambah 64 persen. Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya empat informasi, kini tersedia 10 informasi atau bertambah 150 persen.

Sepanjang 2026, portal PPID UIN Ar-Raniry telah menerima dan melayani 11 permohonan informasi. Rata-rata waktu penyelesaiannya empat hari kerja.

Mujiburrahman mengatakan, pengembangan layanan digital harus diikuti dengan penyediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, informasi publik perlu disajikan secara akurat, terbuka, dan mudah ditemukan.

Dalam tata kelola internal, keterbukaan tersebut antara lain diterapkan melalui proses penjaringan bakal calon rektor periode 2026–2030, penandatanganan pakta integritas pejabat, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pada bidang keuangan, UIN Ar-Raniry meraih predikat satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 100.

Adapun untuk pelayanan kepada masyarakat, universitas telah menyediakan informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara terperinci pada setiap program studi melalui laman Pusat Admisi sejak 2023. Informasi ini dapat diakses calon mahasiswa dan orang tua sebagai bahan pertimbangan sebelum memilih program studi.

Pada bidang akademik, UIN Ar-Raniry telah memperoleh akreditasi institusi Unggul dari BAN-PT.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

3 BERITA

LIFESTYLE

Kekayaan Sekretaris Wantimpres M Qodari Tembus Rp300,59 Miliar

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.50 WIB



Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kekayaan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari tercatat mencapai Rp300,59 miliar.

Sebagian besar harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang nilainya menembus Rp195,38 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan bersih Qodari mencapai Rp300.591.467.679 setelah dikurangi utang.

Sementara itu, total aset sebelum dikurangi utang tercatat sebesar Rp302.768.129.203.

Kekayaan tersebut berasal dari sejumlah komponen, mulai dari properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga kas dan setara kas.

Rincian harta kekayaan Qodari dalam LHKPN

- Tanah dan bangunan: Rp195.388.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp1.828.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp18.007.200.000
- Surat berharga: Rp34.516.604.697
- Kas dan setara kas: Rp52.644.124.492
- Harta lainnya: Rp384.200.014
- Utang: Rp2.176.661.524

Dari keseluruhan aset tersebut, properti menjadi penyumbang terbesar kekayaan Qodari. Nilainya mencapai sekitar 64% dari total aset yang dilaporkan.

Qodari melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan di berbagai wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangka Raya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, hingga Lampung Utara.

Salah satu aset dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Pusat seluas sekitar 780 meter persegi dengan nilai mencapai Rp56,7 miliar.

Di Depok, Qodari juga melaporkan bangunan seluas 2.700 meter persegi senilai Rp11,4866 miliar.

Ada pula bangunan seluas 2.183 meter persegi dengan nilai Rp9,2871 miliar.

Kepemilikan tanahnya juga mencakup lahan berukuran sangat luas di Palangka Raya.

Beberapa bidang tanah yang tercatat memiliki luas 90.275 meter persegi, 110.000 meter persegi, 560.000 meter persegi, hingga 670.000 meter persegi.

Tanah seluas 670.000 meter persegi tersebut dilaporkan bernilai sekitar Rp1,041 miliar.

Sementara tanah seluas 600.000 meter persegi tercatat bernilai Rp1,89 miliar. Ada pula bidang tanah dengan luas yang sama senilai Rp933 juta.

Dalam LHKPN, aset tanah dan bangunan tersebut dilaporkan sebagai hasil sendiri.

Koleksi Kendaraan

Selain properti, Qodari memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai Rp1,828 miliar.

Koleksi tersebut terdiri dari Toyota Kijang Innova 2.0 V AT tahun 2018 senilai Rp265 juta, Neta V-II tahun 2024 senilai Rp205 juta, Honda CMX500 Rebel tahun 2020 senilai Rp150 juta, serta Wuling Air EV Long Range tahun 2022 senilai Rp120 juta.

Kendaraan dengan nilai paling tinggi adalah Maxus MIFA 9 tahun 2025 senilai Rp1,088 miliar.

Gaji dan Fasilitas Wantimpres

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Indonesia Peringkat 9 Negara Kepulauan Favorit 2026

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 13.33 WIB



Sumber: wonderfulimages.kemenparekraf.go.id

JAKARTA – Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara kepulauan yang paling diminati wisatawan dunia pada 2026. Berdasarkan hasil Wanderlust Reader Travel Awards 2026, Indonesia menempati peringkat kesembilan dalam kategori Most Desirable Island Country. Sementara itu, Filipina berhasil menduduki posisi teratas.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu catatan bagi pariwisata Indonesia di tengah persaingan destinasi wisata internasional. Meski belum menembus lima besar, posisi Indonesia menunjukkan bahwa daya tarik wisata kepulauan Tanah Air masih mendapat perhatian dari wisatawan mancanegara.

Penghargaan tahunan yang diselenggarakan majalah perjalanan asal Inggris, Wanderlust, ini memasuki penyelenggaraan ke-25 pada 2026. Penentuan pemenangnya dilakukan melalui pemungutan suara pembaca. Pada tahun ini, sebanyak 251.461 pembaca berpartisipasi dengan menghasilkan lebih dari 8,2 juta suara dalam berbagai kategori penghargaan.

Mengutip publikasi resmi Wanderlust Magazine yang diumumkan pada November 2026, Filipina meraih penghargaan tertinggi atau Gold, disusul Barbados dengan Silver dan Bahama dengan Bronze. Indonesia berada di urutan kesembilan, tepat di atas Jamaika yang menempati posisi kesepuluh.

Keunggulan Filipina dalam pemeringkatan tersebut tidak terlepas dari keragaman bentang alam, kekayaan budaya, serta potensi wisata baharinya. Negara yang memiliki 7.641 pulau itu menawarkan berbagai pengalaman perjalanan, mulai dari kawasan pantai, wisata sejarah, kehidupan masyarakat adat, hingga keindahan bawah laut.

Sejumlah destinasi yang menjadi sorotan di antaranya Chocolate Hills di Bohol dengan bentang bukit-bukit khasnya, serta Palawan yang dikenal melalui formasi batu kapur dan perairan jernih. Wisatawan juga dapat menjelajahi Coron untuk mengenal situs kapal karam peninggalan Perang Dunia II.

Selain kekayaan alam, Filipina memiliki daya tarik budaya melalui kawasan persawahan bertingkat di Luzon, kompleks bersejarah Intramuros di Manila, serta tradisi kuliner Iloilo. Keragaman tersebut menjadi bagian dari alasan negara itu memperoleh suara tertinggi dalam kategori negara kepulauan paling diminati.

Di bawah Filipina, Barbados menempati posisi kedua dan Bahama berada di urutan ketiga. Berikutnya terdapat Irlandia di peringkat keempat, Malta pada posisi kelima, Maladewa di urutan keenam, Islandia di peringkat ketujuh, dan Fiji pada posisi kedelapan.

Indonesia kemudian menyusul di posisi kesembilan, sedangkan Jamaika melengkapi daftar sepuluh besar.

Sebagai negara dengan wilayah kepulauan yang luas, Indonesia memiliki potensi wisata bahari dan bentang alam yang tersebar dari ujung barat hingga timur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Gibran Mundur, Segini Uang Pensiun dan Fasilitas yang Didapat

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.22 WIB



BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka akan menerima uang pensiun sekitar Rp20,16 juta per bulan setelah resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden. Tak hanya uang pensiun, Gibran juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas dari negara, mulai dari rumah hingga kendaraan beserta pengemudinya.

Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 Ayat (1), aturan tersebut menyebut Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarannya mencapai 100% dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Ayat (2).

Adapun gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan mengenai gaji pejabat negara tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Gaji pokok tertinggi untuk pejabat negara, termasuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Angka inilah yang menjadi dasar perhitungan uang pensiun Gibran.

Pembayaran pensiun tersebut berlaku seumur hidup. Namun, UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur dua kondisi yang menyebabkan pembayaran dihentikan, yakni ketika mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1). Sementara Ayat (2) mengatur pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan keenam setelah mantan Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia.

Jika mantan Wakil Presiden kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, pembayaran pensiunnya dihentikan selama menduduki jabatan tersebut. Apabila kemudian kembali berhenti dengan hormat, hak pensiun dan tunjangan diberikan sesuai ketentuan yang lebih menguntungkan.

Selain pensiun pokok, Gibran juga berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas negara setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.

Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya turut ditanggung negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

11 BERITA

INTERNASIONAL

Jepang Cemas Arah Kebijakan Trump di Indo-Pasifik

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 15.23 WIB



Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam pertemuan diplomatik. Jepang mewaspadai kemungkinan perubahan kebijakan Washington yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. (Foto: Alex Wong/Getty Images)

TOKYO – Pemerintah Jepang meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026.

Perhatian Tokyo tertuju pada langkah Presiden AS Donald Trump setelah hasil pemilu sela Amerika Serikat yang berlangsung 3 November 2026. Pemerintah Jepang menilai dinamika politik domestik Washington berpotensi memengaruhi prioritas diplomasi AS, termasuk dalam menentukan hubungan dengan China dan negara-negara sekutunya di kawasan Asia-Pasifik.

Kekhawatiran tersebut muncul menjelang pertemuan sejumlah pemimpin negara besar dalam agenda APEC. Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan menghadiri forum tersebut. Pertemuan mereka berpotensi membawa perkembangan baru dalam hubungan kekuatan besar dunia.

Pemerintah Jepang mengantisipasi kemungkinan Washington mengutamakan kesepakatan diplomatik dengan Beijing demi memperoleh keuntungan politik. Langkah semacam itu dikhawatirkan mengabaikan kepentingan negara-negara sekutu AS yang selama ini bergantung pada dukungan keamanan Washington.

Upaya Tokyo membaca arah kebijakan Gedung Putih terlihat melalui pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Paris, Prancis, pada Senin, 9 November 2026, di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri G7.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Jepang pada 9 November 2026, kedua negara menyepakati penguatan kerja sama keamanan untuk meningkatkan kemampuan penangkalan dan respons dalam kerangka aliansi Jepang-AS. Mereka juga berkomitmen mempertahankan komunikasi intensif mengenai perkembangan situasi Indo-Pasifik.

Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran Tokyo terhadap kemungkinan perubahan prioritas diplomasi Washington.

Kekhawatiran Jepang terhadap Kedekatan AS-China

Profesor ilmu politik Universitas Tokyo, Sebastian Maslow, menilai perubahan peta politik domestik AS dapat mendorong Trump lebih aktif menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk memperkuat citra kepemimpinannya.

Menurut analisis Maslow kepada Deutsche Welle (DW), kemungkinan kesepakatan Washington dengan Beijing dapat memberikan keuntungan strategis bagi Presiden Xi Jinping. Situasi tersebut berpotensi memperbesar tekanan China terhadap Jepang, terutama ketika hubungan kedua negara sedang mengalami ketegangan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pun menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan Washington dan Beijing. Tokyo harus memastikan kepentingan keamanannya tidak dikorbankan apabila AS memilih pendekatan diplomasi yang lebih menguntungkan hubungannya dengan China.

INTERNASIONAL

Panas Lagi! Iran Serang Pangkalan Militer AS di Bahrain

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.46 WIB



BANDA ACEH - Militer Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Bahrain, Jumat (13/11/2026) dini hari. Serangan itu sebagai pembalasan atas gempuran AS terhadap menara telekomunikasi Iran di Sirik, Provinsi Hormozgan, Kamis malam.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menargetkan radar peringatan dini AS di Bahrain.

IRGC juga menyebut serangan itu sebagai peringatan serius terhadap agresor AS agar menghentikan provokasi udara dan penyelundupan minyak di Selat Hormuz.

"Jika pelanggaran dan tindakan agresi ini terulang lagi, Pasukan Dirgantara IRGC siap sepenuhnya untuk terlibat tanpa batas," bunyi pernyataan IRGC, seperti dilaporkan kantor berita Tasnim.

Pasukan Dirgantara IRGC mengeklaim berhasil menghancurkan instalasi radar AS di Bahrain. Namun sejauh ini belum ada komentar dari AS maupun otoritas Bahrain.

Bahrain menjadi markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS.

Ini merupakan serangan pertama Iran ke pangkalan AS di Bahrain sejak awal September.

Sementara itu kabinet keamanan Israel memerintahkan militer untuk meningkatkan persiapan menghadapi kemungkinan serangan terhadap Iran.

Kepala keamanan Iran Mohsen Rezaei memperingatkan jika AS dan Israel kembali melancarkan perang, setiap pangkalan militer yang terlibat, mulai dari Asia Barat hingga Eropa, akan menjadi target sah.

Ketua parlemen Iran yang juga ketua juru runding untuk konflik melawan AS, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang.

Menurut dia, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perang saat ini ada di tangan AS.

Komando Pusat (Centcom) AS menyatakan pasukannya masih menerapkan blokade maritim secara ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran

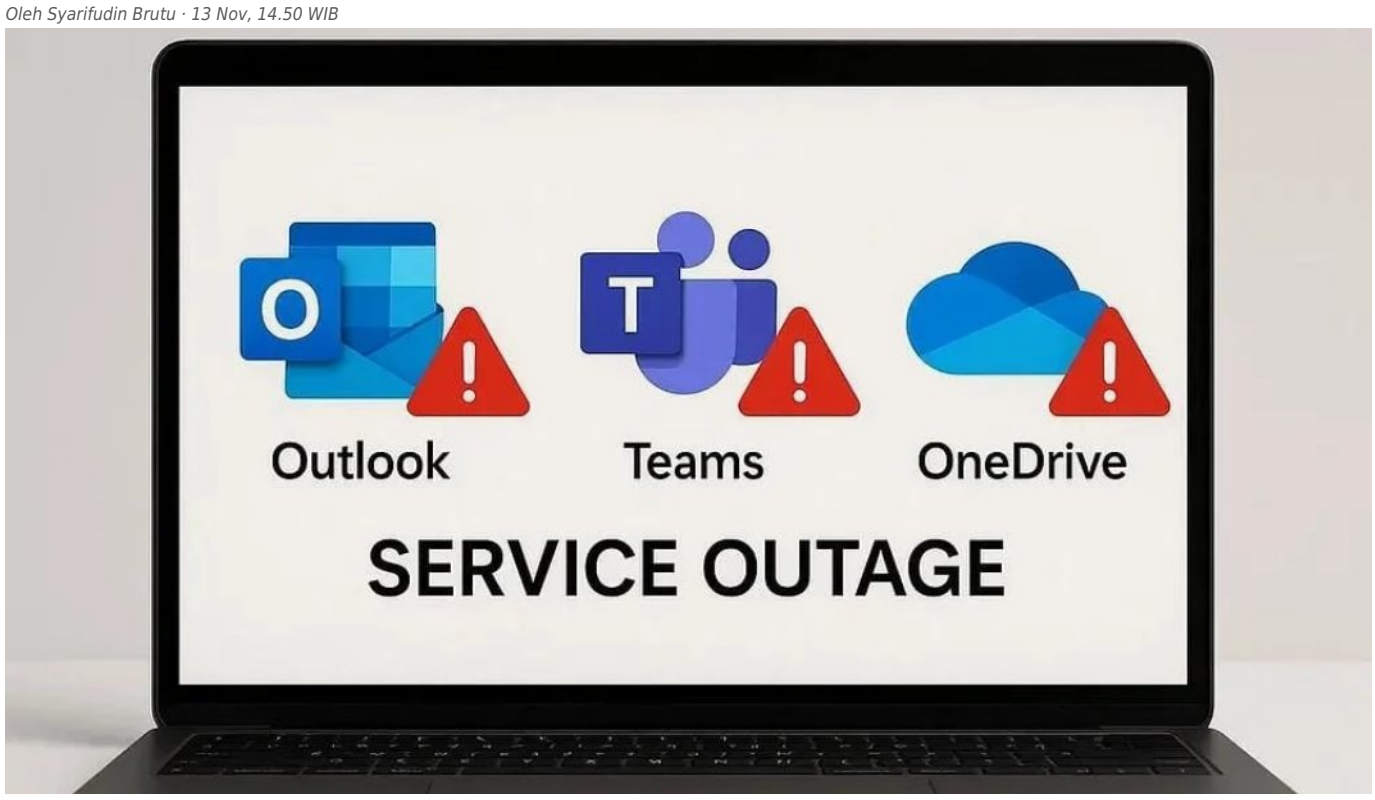
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

TEKNOLOGI

Microsoft Down, 74 Negara Terdampak, Aktivitas Publik Terganggu

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 14.50 WIB



Ilustrasi layanan Microsoft 365, Outlook, dan Teams yang mengalami gangguan secara global pada 12–13 November 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Gangguan layanan digital Microsoft meluas ke sedikitnya 74 negara dan wilayah pada Kamis (12/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026). Insiden yang melumpuhkan akses Microsoft 365, Outlook, dan Teams tersebut menghambat pekerjaan sektor pemerintahan, perbankan, pendidikan, hingga lembaga peradilan di sejumlah negara.

Meluasnya gangguan itu menunjukkan besarnya ketergantungan berbagai sektor terhadap infrastruktur digital Microsoft. Sejumlah aktivitas pekerjaan yang mengandalkan surat elektronik, komunikasi daring, dan aplikasi perkantoran tidak dapat berjalan normal selama layanan mengalami kendala.

Pada awalnya, Microsoft mengidentifikasi persoalan konektivitas tersebut terjadi di Amerika Serikat (AS). Namun, laporan penggguna yang terus bertambah memperlihatkan bahwa dampaknya tidak terbatas pada kawasan Amerika Utara, melainkan menjangkau berbagai wilayah internasional.

Berdasarkan pemantauan Downdetector, laporan gangguan tercatat dari 74 negara dan wilayah. Lonjakan juga terjadi di sejumlah negara, termasuk Inggris, India, dan Selandia Baru.

Dalam keterangannya melalui akun X pada Jumat (13/11/2026), Downdetector menyebut laporan gangguan di Inggris meningkat hingga sepuluh kali lipat. Lonjakan serupa juga terpantau di India dan Selandia Baru. Bahkan, hampir 30 persen laporan yang masuk dalam rentang pukul 17.00–18.55 UTC berasal dari luar Amerika Serikat.

Gangguan Meluas ke Sektor Pemerintahan dan Perbankan

Dampak pemadaman layanan Microsoft turut dirasakan di Australia. Sejumlah sekolah, pengadilan, serta instansi pemerintahan mengawali aktivitas Jumat pagi dengan kendala akses Outlook dan sejumlah aplikasi Microsoft lainnya.

Di Hong Kong, gangguan tersebut menghambat pekerjaan pegawai sektor perbankan. Karyawan Morgan Stanley dan Goldman Sachs dilaporkan mengalami kesulitan membuka surat elektronik maupun menggunakan Microsoft Teams sejak awal jam kerja hingga waktu istirahat siang.

Seorang pekerja perbankan mengatakan sebagian email sesekali masih dapat diterima. Namun, terdapat banyak pesan elektronik yang belum berhasil diproses akibat gangguan tersebut.

Sementara itu, di Jepang, kendala layanan Microsoft turut memengaruhi aktivitas administrasi pemerintahan. Wakil Sekretaris Kabinet Jepang, Masano Ozaki, menyampaikan bahwa sejumlah pegawai pemerintah menggunakan salinan dokumen fisik sebagai alternatif ketika sistem digital mengalami gangguan.

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah bahkan tidak dapat mengirimkan email selama sebagian besar jam kerja.

Dampak serupa terjadi di Filipina. Mahkamah Agung negara tersebut memperingatkan bahwa gangguan layanan Microsoft berpotensi memperlambat respons terhadap surat elektronik serta berbagai transaksi administratif yang membutuhkan sistem digital.

Laporan Gangguan di AS Tembus 128 Ribu

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

APBK 2027 Aceh Barat Capai Rp1,28 Triliun, Ini Prioritasnya

Oleh Biro Meulaboh · 13 Nov, 15.32 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM menerima dokumen Rancangan Qanun APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Barat,FOTO/HAI

MEULABOH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2027 mencapai Rp1,28 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna VII Masa Sidang III DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan APBK 2027, bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH, di ruang sidang utama DPRK, Jumat (13/11/26).

Tarmizi mengatakan, Pemkab Aceh Barat telah merampungkan input rincian APBK 2027 berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya.

Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia mengakui, kemampuan keuangan daerah masih terbatas karena pendapatan Aceh Barat sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah dituntut lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Setiap belanja pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Tarmizi.

Menurutnya, pembangunan Aceh Barat pada 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Seluruh program tersebut, lanjutnya, harus disusun secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Adapun rancangan komposisi APBK Aceh Barat 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp1.250.013.392.044, belanja daerah Rp1.289.886.422.836, serta pembiayaan daerah Rp39.873.030.792.

Tarmizi berharap DPRK dapat memberikan masukan dan saran konstruktif untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menyusun program dan kegiatan secara cermat, dengan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Keterbatasan anggaran harus menjadi dorongan bagi kita untuk bekerja lebih kreatif, inovatif, serta mengutamakan hasil dan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Tarmizi menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama pembahasan APBK 2027 berlangsung, kecuali untuk kepentingan mendesak dan telah mendapat persetujuan darinya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

LAPANGAN PEKERJAAN

79 Persen Buruh Terancam Sulit Memiliki Rumah

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 15.04 WIB



Sumber gambar: BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Persoalan kepemilikan rumah masih menjadi beban serius bagi pekerja dan buruh di kawasan industri. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan sekitar 79 persen pekerja berpotensi tidak mampu membeli rumah apabila skema pembiayaan dan jangka waktu kredit perumahan tidak mengalami perubahan.

Temuan tersebut mengungkap persoalan mendasar dalam akses masyarakat pekerja terhadap hunian layak. Tingginya harga tanah dan rumah, perbedaan tingkat upah antardaerah, serta lokasi tempat tinggal yang jauh dari kawasan industri menjadi sejumlah faktor yang mempersempit kemampuan buruh untuk memiliki rumah sendiri.

Hasil penelitian itu diperoleh melalui survei yang dilaksanakan pada 6–28 September 2026 terhadap 1.028 pekerja di lima kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa. Wilayah penelitian meliputi Pulogadung/JIEP, Jababeka dan MM2100, Industropolis Batang, Tanjung Lesung, serta Gresik.

Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menilai persoalan perumahan pekerja tidak cukup diselesaikan dengan membangun unit rumah sebanyak-banyaknya. Menurutnya, akses terhadap hunian berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pernyataan tersebut disampaikan Nawawi dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 11 November 2026.

Dalam pemaparan hasil penelitian, Nawawi mengungkapkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki hunian mandiri. Dari keseluruhan peserta survei, 76,91 persen merupakan laki-laki dan 76,60 persen berpendidikan SMA/SMK. Sementara itu, sebanyak 59,09 persen responden merupakan pendatang.

Kondisi tersebut semakin terlihat dari tingginya jumlah pekerja yang masih tinggal bersama keluarga. BRIN mencatat 45,54 persen responden menempati rumah orang tua atau mertua dalam satu rumah tangga. Fenomena ini disebut sebagai backlog perumahan tersembunyi.

Di Kabupaten Batang, persentase pekerja yang mengalami kondisi tersebut bahkan mencapai 76,12 persen. Selain itu, kepemilikan rumah juga belum sepenuhnya terjangkau bagi pekerja tetap maupun kontrak. Sebanyak 31,57 persen pekerja tetap dan 57,06 persen pekerja kontrak dilaporkan belum mempunyai rumah sendiri.

Meski menghadapi keterbatasan ekonomi, keinginan pekerja untuk memiliki hunian pribadi masih cukup besar. Survei BRIN menunjukkan 70,74 persen responden menargetkan kepemilikan rumah dalam kurun satu hingga lima tahun mendatang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KOMUNITAS

PBNU Percayakan Penyelesaian Masalah kepada Prabowo, Gus Ipul: Kita Percaya Sepenuhnya

Oleh Van · 13 Nov, 15.25 WIB



Seorang tokoh publik memberikan keterangan pers kepada awak media di tengah sebuah acara formal.

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepercayaan organisasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang.

Gus Ipul meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan maupun menyampaikan pernyataan yang berpotensi memperkeruh keadaan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap sejuk dan kondusif.

"Ya, mari kita jaga bersama-sama. PBNU mengajak kita semua untuk bisa menciptakan suasana yang adem di tengah-tengah masyarakat," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

Gus Ipul Minta Semua Pihak Ikuti Mekanisme

Menurut Gus Ipul, setiap persoalan perlu diselesaikan dengan menghormati mekanisme yang berlaku. Pihak-pihak terkait juga perlu diberi kesempatan untuk mencari jalan keluar terbaik.

Ia menyampaikan bahwa PBNU memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo bersama seluruh lembaga negara untuk menangani persoalan yang sedang berkembang.

"Kita ikuti mekanismenya. Kita beri kepercayaan penuh kepada Pak Presiden beserta seluruh lembaga yang ada untuk bisa mencari solusi yang terbaik," katanya.

Gus Ipul kemudian kembali menegaskan sikap tersebut dengan menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Prabowo.

"Kita percaya sepenuhnya kepada Pak Presiden," kata dia.

Ajak Masyarakat Tidak Memperkeruh Situasi

Pernyataan Gus Ipul menjadi ajakan agar masyarakat tidak terbawa suasana di tengah berbagai perkembangan politik dan persoalan yang menjadi perhatian publik.

Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati serta menjaga ruang publik tetap kondusif. Menurutnya, penyelesaian persoalan sebaiknya diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan.

Sikap tersebut sejalan dengan ajakan PBNU agar masyarakat mengedepankan ketenangan dan menghormati proses yang sedang berjalan.

Gus Ipul tidak merinci persoalan tertentu yang dimaksud dalam pernyataannya. Namun, ia menegaskan bahwa PBNU memberikan kepercayaan kepada Prabowo dan lembaga negara untuk menemukan solusi terbaik.(*)

HIBURAN

Aktivis Usulkan Jokowi dan Keluarganya Ditempatkan di Pulau Terpencil di Ujung Laut Bebas

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.46 WIB



BANDA ACEH - Aktivis kebangsaan Rustam Effendi melontarkan pernyataan kontroversial terkait mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Ia mengusulkan agar Jokowi bersama keluarganya ditempatkan di sebuah pulau terpencil di ujung laut bebas.Pernyataan tersebut disampaikan Rustam saat membahas dinamika Politik nasional dan sikap keluarga Jokowi setelah muncul polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rustam, agenda perjuangan yang mereka lakukan bukan untuk berdialog dengan Gibran. Ia bahkan menilai Gibran sudah tidak memiliki posisi penting untuk diajak berdialog.

"Agenda kita hari ini bukan berdialog dengan Gibran. Gibran bukan siapa-siapa lagi. Jadi, tidak butuh kita untuk berdialog dengan dia," kata Rustam di Podcast Obor Rakyat Reborn, Kamis (12/11/2026).

Ia mengungkapkan, dalam sebuah pertemuan, dirinya sempat menerima bisikan mengenai kekhawatiran terhadap tindakan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Dia bilang begini, 'Paspampres itu, Paspampres itu, takut ya, takut nih ya, takut ya saya digituin.' Wah, provokatif itu kan. Di situ saya marah," ungkapnya.

Rustam menegaskan, kedatangan kelompoknya saat itu bukan untuk berdialog dengan Gibran. Mereka justru meminta agar Gibran meninggalkan gedung tempat kegiatan berlangsung.

Dalam pernyataannya, Rustam juga melontarkan tudingan keras terhadap sejumlah tokoh. Ia bahkan menyebut nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan mengaitkannya dengan PKI.

Tak berhenti di situ, Rustam juga menyinggung gaya bicara sejumlah orang pendukung Jokowi dan Gibran terlalu berapi-api ketika menyampaikan pendapat. Ia mencontohkan Andi Azwan dan mengusulkan agar sejumlah pihak menjalani tes urine.

"Kalau menurut saya ini harus dites urine, Bang. Siapa? Jokowi dan keluarga," ujarnya.

Pernyataan paling kontroversial muncul ketika Rustam mengusulkan agar Jokowi dan keluarganya ditempatkan di sebuah pulau terpencil.

"Kasih saja dia pulau satu di paling ujung di laut bebas. Bikin pulau, suruh tinggal di situ saja. Kalau menurut saya begitu," kata Rustam.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kerasnya sikap Rustam terhadap Jokowi dan keluarganya di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional.

Meski melontarkan pernyataan bernada keras, Rustam menutup keterangannya dengan menyatakan keyakinan bahwa perjuangan yang mereka lakukan membutuhkan perlindungan Allah SWT serta dukungan masyarakat.

"Umur kita semua diatur oleh Allah. Saya percaya perjuangan kami ini perlu perjuangan yang dilindungi oleh Allah dan didukung oleh rakyat," pungkasnya.

EDUKASI

FEBI UIN Ar-Raniry dan UIN Sultanah Nahrasyiah Bahas Penguatan Kurikulum OBE

Oleh FEBI · 13 Nov, 12.31 WIB



Momen kebersamaan staf dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. FOTO/Dok. FEBI UIN Ar-Raniry.

BANDA ACEH – Penguatan kualitas pendidikan tinggi melalui kurikulum berbasis capaian pembelajaran atau Outcome-Based Education (OBE) menjadi perhatian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan FEBI UIN Sultanah Nahrasyiah.

Kedua fakultas tersebut bertukar pengalaman dan membahas penerapan OBE dalam kunjungan akademik di Ruang Rapat Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Jumat (13/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung selama dua setengah jam itu diikuti pimpinan kedua fakultas, mulai dari dekan, wakil dekan, hingga ketua program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah.

Pembahasan berfokus pada bagaimana kurikulum perguruan tinggi tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi dan akreditasi, tetapi benar-benar mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M., mengatakan penerapan OBE membutuhkan komitmen menyeluruh dari perguruan tinggi, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi hasil pendidikan.

"Pengembangan kurikulum berbasis OBE bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi atau kebutuhan akreditasi, tetapi merupakan upaya mendasar untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan benar-benar berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan," ujarnya.

Menurut Azharsyah, pertukaran pengalaman antarfakultas penting untuk mengidentifikasi persoalan dalam penerapan OBE sekaligus menemukan solusi yang dapat dikembangkan bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Laboratorium dan Penjaminan Mutu FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Evriyenni, memaparkan pengalaman fakultas dalam menyelaraskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), proses pembelajaran, serta mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu.

Selain kurikulum, pengembangan kompetensi mahasiswa juga menjadi pembahasan.

Wakil Dekan III FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, menjelaskan sejumlah fasilitas dan program yang dimanfaatkan untuk memperkuat keterampilan mahasiswa, seperti Tax Center, Galeri Investasi Syariah, Pojok Statistik, KPM Tematik, program MBKM, serta Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI).

Sementara itu, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ana Fitria, S.E., M.Sc., memaparkan pemanfaatan SIAKAD Cloud dalam pengelolaan kurikulum berbasis OBE.

Sistem tersebut mendukung pengelolaan profil lulusan, CPL, distribusi mata kuliah, hingga pengukuran ketercapaian pembelajaran.

Melalui integrasi sistem informasi akademik, keterkaitan antara mata kuliah, proses pembelajaran, dan capaian lulusan dapat ditelusuri secara lebih terstruktur.

Hasil pengukuran tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan kurikulum.

Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan pimpinan dan pengelola program studi dari kedua fakultas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

GAME

Over The Hill, Game Baru untuk Penggemar Mobil 4×4 dan Petualangan Alam

Oleh Van · 13 Nov, 11.59 WIB



Mulailah petualangan menakjubkan melewati alam liar yang penuh warna. Rasakan sensasi berkendara di bawah indahnya matahari terbenam.

JAKARTA — Penggemar kendaraan SUV 4x4 dan aktivita off-road kini memiliki pilihan permainan baru. Game berjudul over the hill menghadirkan pengalaman menjelajahi alam liar menggunakan kendaraan berpenggerak empat roda dengan berbagai tantangan medan.

Game yang dikembangkan Funselektor bersama Strelka Games ini resmi dirilis pada 14 Oktober 2026 untuk PC melalui platform Steam. Berbeda dari game balap pada umumnya, over the hill lebih mengutamakan petualangan, eksplorasi, dan kemampuan pengemudi menghadapi kondisi medan yang beragam.

Dune Casu, Founder sekaligus Creative Director Funselektor, mengatakan bahwa game tersebut berawal dari gagasan sederhana untuk menghadirkan pengalaman menjelajahi alam menggunakan kendaraan 4x4 klasik.

"Game ini dimulai dari ide sederhana untuk membuat permainan eksplorasi pemain tunggal, di mana seseorang bisa masuk ke dalam mobil 4x4 lawas, menuju alam liar, dan melihat ke mana perjalanan akan membawanya," ujar Dune Casu dalam keterangan resmi Funselektor yang dilihat Kamis (12/11/2026).

Menggunakan Kendaraan 4x4 Klasik

Salah satu daya tarik over the hill adalah pilihan kendaraan yang terinspirasi dari mobil off-road klasik era 1960-an hingga 1980-an.

Pemain dapat mengendarai kendaraan tersebut untuk menjelajahi berbagai lingkungan alam, mulai dari hutan, kawasan pegunungan, hingga area danau.

Tantangan permainan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengendalikan kendaraan. Pemain juga harus mencari jalur yang tepat ketika menghadapi rintangan di sepanjang perjalanan.

Ketika kendaraan terjebak atau kesulitan melewati medan tertentu, tersedia peralatan seperti winch untuk menarik kendaraan serta papan kayu untuk membantu melewati celah atau rintangan.

Permainan ini juga menghadirkan perubahan cuaca dan siklus siang-malam. Kondisi lingkungan tersebut dapat memengaruhi suasana dan tantangan selama perjalanan.

Bisa Dimainkan Bersama Teman

Selain dimainkan sendiri, over the hill mendukung mode online co-op hingga empat pemain. Fitur ini memungkinkan pemain menjelajahi medan bersama teman sekaligus membantu kendaraan lain yang mengalami kesulitan.

Pemain juga dapat menemukan peningkatan kendaraan dan perlengkapan selama eksplorasi. Sejumlah pilihan warna, aksesori, serta kosmetik tersedia untuk menyesuaikan tampilan kendaraan.

Menariknya, permainan ini tidak menempatkan kecepatan sebagai tujuan utama. Pemain bebas menentukan jalur perjalanan, menjelajahi lokasi baru, hingga mendirikan tempat berkemah untuk beristirahat.

Bukan Simulator Off-Road Sepenuhnya

Meski mengusung kendaraan 4x4 dan medan ekstrem, over the hill lebih tepat disebut sebagai game eksplorasi off-road daripada simulator berkendara profesional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Dana Hibah Norwegia, Untuk Dunia Yang Lebih Baik?

Oleh Rut sw · 13 Nov, 09.50 WIB



Gambar ini menampilkan teks "INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030" dengan desain grafis yang bersih dan modern. Latar belakang putih dihiasi dengan garis-garis biru melengkung yang

TUSAN khusus presiden untuk iklim dan energi, Hashim Djojohadikusumo, membawa oleh-oleh dana hibah baru sebesar US$100 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun dari Norwegia atas keberhasilannya dalam mengurangi emisi karbon dan deforestasi pada periode 2021-2023 melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil (RBC) selama COP31 di Turki.

Kemitraan dengan Norwegia yang sudah berjalan 16 tahun, menurut Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Sigrun Aasland semakin menguatkan komitmen kedua negara, dimana Indonesia berkomitmen melindungi hutan, sedangkan Norwegia memberikan pembayaran berdasarkan hasil yang dicapai Indonesia, salah satunya keberhasilan dalam pengurangan emisi karbon dan deforestasi yang saat ini berada di antara angka terendah dalam sejarah.

Kerja sama ini kembali terjalin dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026.

Selain Hasyim, turut hadir adalah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wamenhut Rohmat Marzuki dan Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Sigrun Aasland.

Jumhur Hidayat mengatakan, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU) menjadi salah satu sektor sentral dalam upaya pengurangan emisi.

Langkah yang dilakukan meliputi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan lahan gambut dan mangrove, restorasi ekosistem, hingga pencegahan kebakaran hutan.

Hasyim mengatakan jika Norwegia mengakui pencapaian Indonesia tersebut melalui kontribusi berbasis hasil, serta mendukung implementasi lebih lanjut itu artinya dunia internasional pun menganggap Indonesia ada dan berharga.

Melalui mekanisme yang sama Result-Based Contribution (RBC) atau skema pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP), Norwegia sebelumnya telah memberikan hingga US$216 juta untuk Indonesia sebagai pengakuan atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU) (antaranews,13-11-2026).

Aasland menganggap insentif tersebut sebagai mekanisme penting untuk mendorong lebih banyak negara melestarikan kawasan hutannya.

Ia berharap hibah baru ini akan mendukung upaya Indonesia dalam menjadikan hutan dan lahan sebagai penyerap karbon alami.

Ia juga menyoroti komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat dalam empat tahun ke depan sebagai langkah penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam melindungi hutan dan mengambil tindakan terkait perubahan iklim.

Akal-Akalan Kapitalisme Memoles Keburukan Jadi Kemanusiaan

Kita mungkin bertanya, dana hibah atau yang seringkali disebut investasi tanpa balas yang dibawa pulang Hasyim seolah tak tepat, mengingat karhutla …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Oleh Redaksi · 13 Nov, 09.03 WIB



Gambar ini menampilkan kolase empat foto tokoh politik Indonesia, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Mahfud MD, dan Sufmi Dasco Ahmad. Setiap foto menunjukkan para pemimpin ini dalam berbagai suasana resmi kenegaraan dengan latar belakang bendera atau podium. Kolase ini mencerminkan tokoh-tokoh kunci yang memegang peranan penting dalam panggung

Oleh: Nu'man Fauzi ((Aktivis Gerakan Buruh, Alumni HMI))

ERGANTIAN kepemimpinan nasional, termasuk kemungkinan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar persoalan siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, persoalan ini menyangkut arah pemerintahan, keberlanjutan pembangunan, stabilitas Politik, serta harapan rakyat terhadap terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

Di tengah dinamika politik nasional pada November 2026, muncul sejumlah nama dari berbagai latar belakang yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi publik mengenai kepemimpinan nasional. Mereka berasal dari kalangan pemerintahan dan politisi, akademisi dan teknokrat, aktivis buruh, serta tokoh agama dan ulama.

Setidaknya terdapat sebelas tokoh yang dapat dibahas berdasarkan pengalaman, kontribusi, dan rekam jejak pengabdiannya kepada bangsa. Namun, sebelas nama ini bukan daftar resmi calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden kepada MPR. Nama-nama tersebut merupakan pemetaan figur dalam ruang diskusi dan aspirasi masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata siapa yang memiliki kekuatan politik atau kedekatan dengan Presiden, melainkan apa yang telah dikerjakan, apa capaian yang dapat dibuktikan, dan seberapa jauh pengabdiannya memberikan manfaat bagi rakyat.

Pertama: Kalangan Pemerintahan dan Politisi

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengalamannya mencakup kepemimpinan militer, organisasi politik, serta pemerintahan. Ia pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Capaian AHY perlu ditelaah melalui hasil koordinasi pembangunan infrastruktur, penanganan persoalan pertanahan, kepastian hukum atas tanah masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

2. Sufmi Dasco Ahmad

Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan tokoh Partai Gerindra, Dasco memiliki pengalaman dalam kepemimpinan parlemen, koordinasi politik, serta pembahasan kebijakan nasional. Rekam jejaknya dapat dinilai dari kontribusi legislasi, fungsi pengawasan DPR, dan peran dalam membangun komunikasi antara pemerintah dengan berbagai kekuatan politik. Namun, kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin.

3. Sugiono

Sugiono merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Pengalamannya dapat ditelaah melalui pelaksanaan diplomasi internasional, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta kontribusi kebijakan luar negeri terhadap kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Dalam situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks, hasil diplomasi harus dapat dilihat dari manfaat konkretnya bagi negara dan masyarakat.

4. Puan Maharani

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin